



LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH

(LKjIP) **2016**  
**KABUPATEN PATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Setyabudi No. 34 A Telp. (0295) 381842 Pati - Kode Pos 59115

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pati, 2 Maret 2017

Inspektur Kabupaten Pati



Drs. SUMARSONO HADI, M.M  
Pembina Utama Muda

NIP.19610109 198403 1 006

## KATA PENGANTAR



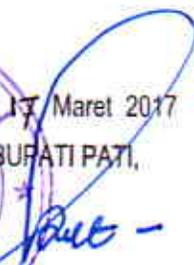
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah robbil'alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Pemerintah Kabupaten Pati telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016 dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Hingga akhir tahun 2016 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Pati secara bertahap telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang diukur dengan total 48 (empat puluh delapan) indikator, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Dari 48 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 34 IKU telah memenuhi kriteria sangat tinggi (71%), 8 IKU memenuhi kriteria tinggi, 2 IKU memenuhi kriteria sedang, 2 IKU memenuhi kriteria rendah; dan 2 IKU memenuhi kriteria sangat rendah. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKJIP Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pati, 17 Maret 2017  
BUPATI PATI,  
  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Pemerintahan .....	1
1.2 Kepegawaian.....	2
1.3 Kondisi Geografis Daerah.....	2
1.4 Gambaran Umum Demografi .....	4
1.5 Sistematika .....	5
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Prioritas Pembangunan Daerah.....	6
2.2 Indikator Kinerja .....	8
2.3 Perjanjian Kinerja .....	12
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2016.....	17
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian Kinerja.....	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3 Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV    PENUTUP .....	70
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah di Kabupaten Pati menurut Tingkat Pendidikan	2
1.2	Statistik Iklim, Geografi dan Topografi Kabupaten Pati Tahun 2013-2015	4
1.3	Indikator Kependudukan Kab. Pati (Penduduk Tengah Tahun 2014 dan 2015)	4
2.1	Prioritas Pembangunan Daerah	7
2.2	Indikator keluaran output yang diubah menjadi indikator keluaran <i>outcome</i>	8
2.3	Indikator yang mengalami penyesuaian	8
2.4	Matrik Hubungan erioritas RKPD 2016 dengan Sasaran dan Indikator Kinerja	10
2.5	Matrik Program Kegiatan Dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pati 2016	13
2.6	Target Belanja Daerah	17
2.7	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2016	18
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016	20
3.3	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2016	22
3.4	Kondisi Sekolah di Kabupaten Pati	22
3.5	Angka APM dan APK	23
3.6	Rasio Jumlah Guru dan Murid	23
3.7	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir RPJMD	24
3.8	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2016	25
3.9	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	26
3.10	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir RPJMD	27
3.11	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2016	28
3.12	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Akhir RPJMD	29
3.13	Jumlah Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Pati 2016	29
3.14	Jenis Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	30
3.15	Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Tahun 2016	31
3.16	Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Akhir RPJMD	32
3.17	Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Tahun 2016	34
3.18	Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Akhir RPJMD	35

Tabel	Judul	Halaman:
3.19	Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Tahun 2016	36
3.20	Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan Tahun 2016	37
3.21	Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Akhir RPJMD	37
3.22	Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Tahun 2016	38
3.23	Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Akhir RPJMD	40
3.24	Perkembangan Posyandu Kabupaten Pati Tahun 2014-2016	40
3.25	Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Tahun 2016	42
3.26	Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Akhir RPJMD	43
3.27	Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Tahun 2016	44
3.28	Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Akhir RPJMD	45
3.29	Data Perkoperasian Kabupaten Pati	46
3.30	Data UMKM Kabupaten Pati	47
3.31	Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Tahun 2016	47
3.32	Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Pati	48
3.33	Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Akhir RPJMD	48
3.34	Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Tahun 2016	49
3.35	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014-2016	50
3.36	Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Akhir RPJMD	50
3.37	Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Tahun 2016	52
3.38	Jalan Kabupaten Pati Kondisi s/d Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2016	53
3.39	Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Terhadap Target Akhir RPJMD	53
3.40	Capaian Indikator Sasaran Strategis 13 Tahun 2016	55
3.41	Capaian Indikator Sasarang Dengan Angka Absolut	56
3.42	Capaian Indikator Sasaran Strategis 14 Tahun 2016	57
3.43	Luas Saluran Irigasi Yang Ada di Kabupaten Pati	57
3.44	Capaian Indikator Sasaran Strategis 14 Terhadap Target Akhir RPJMD	57
3.45	Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Tahun 2016	58
3.46	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pati 2016	58
3.47	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati	59
3.48	Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Akhir RPJMD	59

Tabel	Judul	Halaman:
3.49	Capaian Indikator Sasaran Strategis 16 Tahun 2016	60
3.50	Data PMDN dan PMA Kabupaten Pati Tahun 2016	60
3.51	Capaian Indikator Sasaran Strategis 16 Terhadap Target Akhir RPJMD	61
3.52	Capaian Indikator Sasaran Strategis 17 Tahun 2016	63
3.53	Capaian Indikator Sasaran Strategis 17 Terhadap Target Akhir RPJMD	63
3.54	TPT dan TPAK Kabupaten pati 2014-2016	64
3.55	Capaian Indikator Sasaran Strategis 18 Tahun 2016	64
3.56	Capaian Indikator Sasaran Strategis 18 Terhadap Target Akhir RPJMD	65
3.57	Capaian Indikator Sasaran Strategis 19 Tahun 2016	66
3.58	Capaian Indikator Sasaran Strategis 19 Terhadap Target Akhir RPJMD	66
3.59	Kebutuhan Hidup Lajang dan Upah Minimum Kabupaten Pati Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2016	67
3.60	Target Belanja Daerah APBD Perubahan	68
3.61	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kabupaten Pati	3

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan	2
3.1	Capaian Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2016	21
3.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	30
3.3	Strata Posyandu TA 2016	39
3.4	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	45
3.5	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	54
3.5	Akses Penduduk Jamban Sehat Tahun 2016	55
3.6	Akses Penduduk Terhadap Air Minum Menurut Sarana	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman:
I	Perjanjian Kinerja 2016	72

**T**ata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **1.1 PEMERINTAHAN**

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Pati terdiri dari 7.518 RT, 1.478 RW, dan 406 Desa/Kelurahan. Terakhir pada tahun 2006 ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2013 jumlah RT sebanyak 7.551 RT, Tahun 2014 sebanyak 7.518 RT, dan pada Tahun 2015 jumlahnya tetap 7.518 RT.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pati disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (SKPD di DPPKAD), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (SKPD di Kesbangpol, Satpol PP dan Inspektorat), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,

dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Pemilu legislatif tahun 2014 menghasilkan Anggota DPRD Kabupaten Pati 2014-2019 menurut keanggotaan Partai Politik sebanyak 50 orang. Didominasi oleh PDI-P dan Partai Gerindra yang menyumbangkan anggotanya sebanyak 8 orang atau 16 persen dari total anggota DPRD Kabupaten Pati. Jumlah terbanyak kedua ditempati oleh Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB dengan jumlah anggotanya 6 orang. Sedangkan urutan ke tiga ditempati oleh PKS dengan jumlah anggota 5 orang.

## 1.2 KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS (CPNS) Daerah di Kabupaten Pati pada tahun 2015 adalah 12.835 orang, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 12.286 orang. Di lihat dari komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 6.566 orang, lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 6.269 orang.

Tabel 1.1  
**Jumlah PNS Daerah di Kabupaten Pati  
menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	2013	2014	2015
SD	134	132	149
SLTP	366	321	361
SLTA	2630	2136	2183
D3	1773	1759	1705
S1 / DIV	6768	6998	7435
S2	843	940	1002
<b>Total</b>	<b>12514</b>	<b>12286</b>	<b>12835</b>

*Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka 2016*

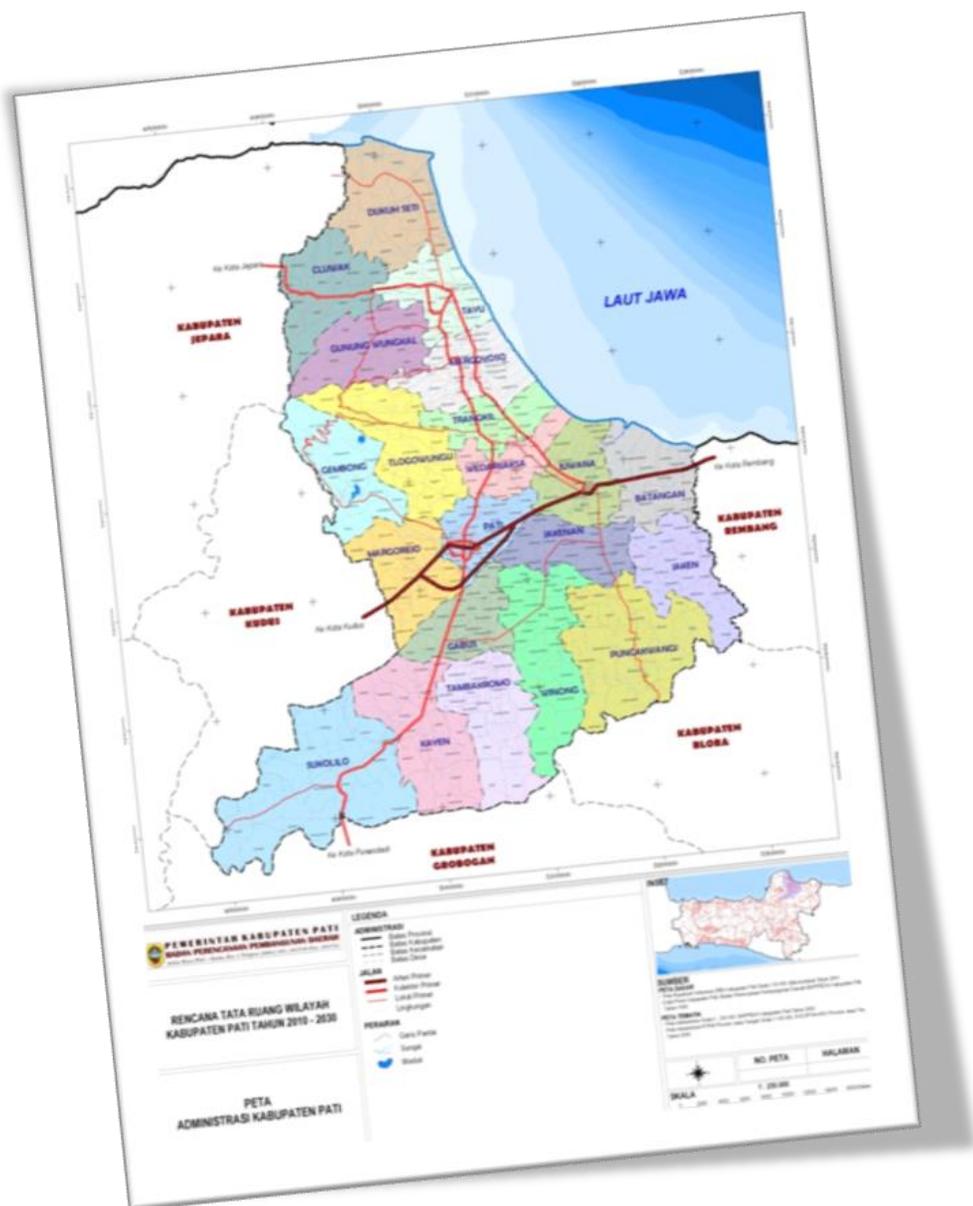
Persentase jumlah PNS dan CPNS Daerah Kabupaten Pati menurut pendidikan pada tahun 2015 yaitu SD sebanyak 1,16 persen, SLTP sebanyak 2,81 persen, SLTA sebanyak 17,01 persen, D3 sebanyak 13,28 persen, S1 sebanyak 57,93 persen dan S2 sebanyak 7,81 persen.

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

## 1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati terletak di pantai utara bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Rembang di bagian timur, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di bagian selatan. Letak astronominya antara 110°,50' dan 111°,15' bujur timur dan 6°,25' dan 7°,00' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha terdiri dari lahan

sawah 59.332 Ha, lahan bukan sawah 48.080 Ha, dan lahan bukan pertanian 46.956Ha.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati

Tahun 2015, curah hujan di Kabupaten Pati sebanyak 3.407 mm dengan 154 hari hujan selama setahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan sebesar 601 mm dengan hari hujan 18 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan sebesar 68 mm dengan hari hujan sebanyak 5 hari.

Rata-rata ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Pati yang terendah adalah Kecamatan Gabus dengan rata-rata ketinggian 3,92 m di atas permukaan laut dan rata-rata tertinggi adalah Kecamatan Gembong 219,36 m di atas permukaan laut.

Menurut hasil pendataan potensi desa (PODES) tahun 2014, sebagian besar desa di Kabupaten Pati merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 354 desa dengan topografi wilayah sebagian besar berada di dataran yaitu sebanyak 339 desa.

Tabel 1.2

Uraian	2013	2014	2015
Luas (Ha)	150.368	150.368	150.368
Hari Hujan (hari)	149	107	154
Curah Hujan (mm)	3.214	2.428	3.407
Desa Pesisir (desa)	52	52	52
Desa Bukan Pesisir (desa)	354	354	354
Desa Puncak (desa)	2	2	2
Desa Lereng (desa)	50	50	50
Desa Lembah (desa)	15	15	15
Desa Daratan (desa)	339	339	339

Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka 2016 dan PODES Pati 2014

#### 1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Komposisi penduduk di Kabupaten Pati bila diamati dari piramida penduduk pada tahun 2015 menuju ke arah yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya arah perkembangan penduduk yang hampir sama dari penduduk usia 0-4 tahun sampai dengan penduduk usia 45-49 tahun. Komposisi penduduk juga dapat dihubungkan dengan *Dependency Ratio* atau Angka Ketergantungan, yaitu yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun) dan (65+ tahun). Angka ketergantungan tahun 2015 sebesar 49,14 persen, berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung sekitar 49 penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tabel Indikator Kependudukan Kabupaten Pati, namun tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 0,60 persen lebih rendah dibanding tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 0,62 persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.503 Km<sup>2</sup>, rata-rata setiap Km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 820 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2015, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 815 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 1.3  
Indikator Kependudukan Kab. Pati  
(Penduduk Tengah Tahun 2014 dan 2015)

Uraian	2014	2015
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.225.594	1.232.912
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,62	0.60
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	815	820
Sex Ratio (L/P) (%)	94	94
Jumlah Rumah Tangga	361.237	363.366
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	4	4

Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka 2016

Sex ratio tahun 2015 nilainya lebih kecil dari 100 yaitu sebesar 94 persen berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2015, status pekerjaan utama penduduk yang bekerja sebagian besar adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 34,18 persen, selanjutnya persentase terbesar kedua adalah dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 20,73 persen. Status pekerjaan berusaha sendiri dari tahun ke tahun ada kecenderungan meningkat yaitu sebesar

13,44 persen pada tahun 2013, sebesar 16,05 persen pada tahun 2014, dan sebesar 16,18 persen pada tahun 2015. Status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya 4,39 persen. Status penduduk sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar lebih banyak dibandingkan pekerja bebas di non pertanian dan pekerja bebas di sektor pertanian.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Pati dari tahun 2013-2015 mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD ke bawah, yaitu masing-masing tercatat sebesar 50,98 persen, 51,17 persen dan 53,25 persen. Pendidikan tinggi (Diploma/Universitas ke atas) masih merupakan bagian terkecil dari penduduk yang bekerja, yakni sebesar 7,93 persen pada tahun 2015. Sedangkan yang berpendidikan SLTP tahun 2015 turun menjadi 18,96 persen bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 19,54 persen dan 2013 sebesar 19,95 persen. Penduduk bekerja yang berpendidikan SLTA tahun 2015 sebanyak 19,86 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yakni sebanyak 22,11 persen.

## 1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

**LAMPIRAN : 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2016.  
2) Lain-lain.**

## PERENCANAAN KINERJA

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2017.

**2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga (2016-2017) pembangunan lima tahunan yaitu tahapan pemantapan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, yang tujuan dan sasarannya diarahkan untuk mewujudkan Pencapaian Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian Visi Kabupaten 2012-2017 yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik". Yang kemudian pada akhirnya bertujuan untuk mendukung tercapainya visi jangka panjang Kabupaten Pati yaitu "Pati Bumi Mina Tani Sejahtera".

Pencapaian visi jangka menengah itu ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.
6. Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.
7. Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Guna mendukung tahap Pemantapan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (Tahun 2016-2017) pada RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012-2017, maka prioritas program pembangunan di Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Pendidikan karakter dan budi pekerti dalam setiap satuan pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
2.	Bantuan sosial santunan kematian	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
3.	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan
4.	Pembangunan USB dan RKB sesuai dengan perkembangan kebutuhan	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
5.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
6.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
7.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
8.	Peningkatan tata kelola pendidikan yang lebih efisien dan efektif.	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
9.	Peningkatan kualifikasi sekolah ke Sekolah Standar Nasional	Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
10.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
11.	Peningkatan pelayanan Posyandu dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
12.	Peningkatan Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
13.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis secara bertahap.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
14.	Peningkatan kualifikasi tenaga medis dan paramedis.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
15.	Peningkatan budaya hidup sehat melalui sekolah, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat	Peningkatan kesadaran pola hidup sehat masyarakat
16.	Peningkatan ketahanan pangan dengan kemudahan mendapatkan pupuk, benih dan obat-obatan pertanian	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
17.	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
18.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
19.	Peningkatan pemasaran dan pengendalian harga hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
20.	Peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
21.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
22.	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/ perikanan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
23.	Pengembangan budidaya perikanan dengan normalisasi saluran tambak	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
24.	Pengembangan perikanan tangkap dengan pembangunan dermaga, dok kapal dan kolam tambat kapal nelayan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan an
25.	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
26.	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
27.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan perkuatan jaringan kluster industri	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
28.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan pemberdayaan UMKM
29.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan
30.	Rehabilitasi dan pembangunan sarana transportasi	Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah
31.	Pengembangan dan pengelolaan drainase dan jaringan irigasi pertanian	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
32.	Peningkatan promosi dan kerjasama dunia usaha	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
33.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
34.	Peningkatan sarana prasarana kursus pelatihan keterampilan	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
35.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
36.	Penanggulangan kemiskinan penduduk	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat

**Sumber: RKPD Kabupaten Pati 2016**

Pada tahun 2016 kebijakan pembangunan di Kabupaten Pati tetap difokuskan pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, antara lain: tata pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, perikanan serta industri.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator kinerja daerah yang tertera dalam RPJMD 2012-2017 beserta dengan proyeksi target tahun 2016 dan target akhir RPJMD 2017, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Didalam mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2016 dipergunakan 48 indikator kinerja utama dari 19 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (*outcome*) dengan penghitungan yang mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pati, untuk meningkatkan akuntabilitas sesuai dengan evaluasi hasil tahun 2015 beberapa indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perbub IKU dirubah sesuai bidang dan urusan yang terkait, seperti berikut ini;

1. Indikator yang diambil dari Renstra SKPD atau Standar pelayanan bidang tertentu.

Sesuai dengan sasaran dalam VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN RPJMD 2012-2017 (BAB V) bila tidak ditemukan indikator yang sesuai untuk mengukurnya maka yang digunakan adalah indikator dan target dari Renstra SKPD yang juga merupakan indikator dari standar pelayanan minimal bidang.

Indikator dalam Tapkin yang keluarannya belum mengacu pada keluaran *outcome* telah diubah menjadi indikator yang mempunyai keluaran *outcome*, yaitu:

**Tabel 2.2 Indikator keluaran output yang diubah menjadi indikator keluaran *outcome***

INDIKATOR Perbup IKU	INDIKATOR PERUBAHAN
Desa siaga aktif mandiri:	Cakupan desa siaga aktif (%)
Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat	Persentase posyandu aktif
Jumlah UMKM dalam binaan	Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

Indikator dalam dalam Perbub IKU berupa Persentase jumlah angkatan kerja perempuan diubah sesuai dengan indikator di dalam RPJMD menjadi Partisipasi angkatan kerja perempuan, Nilai prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah partisipasi jumlah angkatan kerja keseluruhan.

2. Indikator yang mengalami penyesuaian.

Setelah mempelajari kaitan antara indikator dan sasaran yang diukurnya, terdapat indikator yang salah penempatan, atau tidak sesuai dengan sasaran yang hendak diukur, sehingga disesuaikan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan indikator di dalam RPJMD, sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator yang mengalami penyesuaian**

INDIKATOR TAPKIN		Diubah menjadi	INDIKATOR PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR		SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rasio Puskesmas	➔	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)
	Rasio Puskesmas pembantu			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.	Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin:		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.	Rasio Puskesmas
	Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin:			Rasio Puskesmas pembantu

Indikator Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin diubah dengan indikator yang lebih terukur yaitu *Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah)*. Definisi operasionalnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya. Definisi operasionalnya adalah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya di suatu Kabupaten/Kota

Indikator Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin diubah dengan indikator yang lebih terukur yaitu *Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru)*. Adapun yang dimaksud dengan sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Cara penghitungan indikator ini diadopsi dari SPM Bidang Kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008. Kelemahan dari penghitungan indikator ini terletak pada perbandingan antara jumlah pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang adadi kabupaten/kota, sehingga tidak mungkin capaiannya akan mencapai 100 Seharusnya cakupannya didasarkan pada jumlah pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan

Perincian penggunaan 48 indikator kinerja dari 19 sasaran sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2016 Kabupaten Pati adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.4**  
**MATRIK HUBUNGAN PERIORITAS RKPD 2016**  
**DENGAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

PERIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	
1. Peningkatan mutu pendidikan	1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	Bangunan sekolah yang berkondisi baik	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	
	2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
			Rasio guru terhadap murid
			Angka kelulusan SD/MI
			Angka kelulusan SMP/MTs
			Angka kelulusan SMA/MA/SMK
			Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	
		Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
		Jumlah Perpustakaan	
3. Peningkatan kesadaran pola hidup sehat masyarakat	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Pengunjung perpustakaan	
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	
		Kematian Ibu (kasus)	
	6. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.	Kematian Bayi (kasus)	
		Persentase balita gizi buruk	
		Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	
4. Peningkatan pemberdayaan UMKM	7. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	
		Cakupan puskesmas (%)	
	8. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	Cakupan pembantu puskesmas (%)	
		Cakupan desa siaga aktif (%)	
5. Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan,	9. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	Persentase posyandu aktif	
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas(%)	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	
10. Meningkatnya produksi pertanian.	10. Meningkatnya produksi pertanian.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	
		Persentase koperasi aktif	
		Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	
		Produksi tanaman pangan Padi sawah	
		Produksi tanaman pangan Jagung	

peternakan dan perikanan		Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
	11. Meningkatnya produksi Perikanan	Perikanan tangkap Perikanan budidaya
6. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah	12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)
		Panjang jalan dilalui roda 4
	13. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	Rumah tangga bersanitasi (%) Rumah tangga pengguna air bersih (%) Persentase penduduk berakses air minum
7. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah	14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
	15. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Rumah tangga pengguna listrik (%) Rumah layak huni (%)
8. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	16. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	Jumlah investor berskala nasional(PMDN/PMA)
		Jumlah nilai investasi berskala nasional(M.rupiah)
9. Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan	17. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
		Tingkat pengangguran terbuka(%)
10. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	18. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)
	19. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%) Rasio UMK terhadap KHL

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pati 2016 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2016 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2016 ini.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2016 (lampiran I), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun 2012-2017 yang memiliki focus stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati,

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2016 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2016:

**Tabel 2.5**  
**MATRIK PROGRAM KEGIATAN DENGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PATI 2016**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik	75	1. Program pendidikan Menengah 2. Program pendidikan non formal 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,35	
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,90	
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,95	
	5. Rasio guru terhadap murid	1:9	
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	6. Angka kelulusan SD/MI	99,3	1. Program manajemen pelayanan pendidikan 2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program pendidikan kedinasan 4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	7. Angka kelulusan SMP/MTs	98,99	
	8. Angka kelulusan SMA/MA/SMK	98,75	
	9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,82	
	10. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,11	
	11. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,73	
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	12. Jumlah Perpustakaan	1.526	1. Program pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan
	13. Jumlah Pengunjung perpustakaan	29.000	
	14. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.598	
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	15. Kematian Ibu (kasus)	17	1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 3. Program perbaikan gizi masyarakat 4. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 5. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 6. program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 8. Program pelayanan kontrasepsi
	16. Kematian Bayi (kasus)	168	
	17. Persentase balita gizi buruk	0,01	
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	18. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD RAA Soewondo 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kayen 5. Program standarisasi pelayanan kesehatan 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
	19. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	
6. Meningkatnya cakupan pelayanan	20. Cakupan puskesmas (%)	15	1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

kesehatan bagi penduduk miskin.	21. Cakupan pembantu puskesmas (%)	5	2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 3. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
7. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	22. Cakupan desa siaga aktif (%)	100	1. Program kesehatan reproduksi remaja 2. Program pengawasan obat dan makanan 3. Program peningkatan mutu dan keamanan pangan 4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 5. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	23. Persentase posyandu aktif	100	
8. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	24. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas(%)	100	1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
	25. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,31	
	26. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	
9. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	27. Persentase koperasi aktif	100	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 6. Program pengembangan industri kecil dan menengah 7. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 8. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	28. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	25	
10. Meningkatnya produksi pertanian.	29. Produksi tanaman pangan Padi sawah	565.362	1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 4. Program peningkatan produksi peternakan 5. Program peningkatan produksi hasil peternakan 6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 7. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 8. Program peningkatan kesejahteraan petani 9. Program peningkatan ketahanan pangan 10. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 11. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	30. Produksi tanaman pangan Jagung	126.108	
	31. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	60,8	
11. Meningkatnya produksi Perikanan	32. Perikanan tangkap	43.762	1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2. Program pengembangan perikanan tangkap 3. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 4. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 5. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 6. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawan dan pengendalian
	33. Perikanan budidaya	42.300	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</li> <li>8. Program pengembangan budidaya perikanan</li> </ul>
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya.	34. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan jalan dan jembatan</li> <li>2. Program pembangunan jalan dan jembatan</li> <li>3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</li> <li>5. Program pembangunan sistem informasi/database infrastruktur</li> <li>6. Program pembangunan infrastruktur perdesaan</li> </ul>
	35. Panjang jalan dilalui roda 4	799,2	
13. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	36. Rumah tangga bersanitasi (%)	87	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</li> <li>2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</li> </ul>
	37. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	80	
	38. Persentase penduduk berakses air minum	80	
14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.	39. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</li> <li>2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> <li>3. Program pembangunan turap/talud/bronjong</li> <li>4. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong</li> </ul>
15. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	40. Rumah tangga pengguna listrik (%)	95	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan perumahan</li> <li>2. Program lingkungan sehat perumahan</li> <li>3. Program pemberdayaan komunitas perumahan</li> <li>4. Program pengembangan lingkungan sehat</li> <li>5. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</li> <li>6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> </ul>
	41. Rumah layak huni (%)	94	
16. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	42. Jumlah investor berskala nasional(PMDN/PMA)	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</li> <li>2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</li> <li>4. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik</li> <li>5. Program pengembangan kemitraan</li> <li>6. Program penataan struktur industri</li> <li>7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>8. Program pembangunan sentra-sentra industri potensial</li> <li>9. Program kerjasama informasi dengan mass media</li> </ul>
	43. Jumlah nilai investasi berskala nasional(M.rupiah)	1.056	
17. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.	44. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan kesempatan kerja</li> <li>2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>3. Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>4. Program peningkatan kemampuan teknologi industri</li> <li>5. Program peningkatan upaya penunnuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</li> <li>6. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</li> <li>7. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</li> </ul>
	45. Tingkat pengangguran terbuka(%)	6,71	

			8. Program transmigrasi regional
<b>18. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.</b>	46. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya</li> <li>2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</li> <li>3. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun</li> <li>4. program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</li> <li>5. Program pembinaan anak terlantar</li> <li>6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</li> <li>7. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah</li> <li>8. Program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa</li> <li>9. Program rekonstruksi pasca bencana</li> <li>10. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</li> </ol>
<b>19. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.</b>	47. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	81	1. Program perlindungan konsumen dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	48. Rasio UMK terhadap KHL	100	

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran Kabupaten Pati Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.554.346.771.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.745.966.702.000,00 (atau 68% dari total anggaran Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 808.380.069.000,00 (atau 32% dari total anggaran Belanja 2016).

**Tabel 2.6**  
**Target Belanja Daerah**

Uraian	Target (Rp)	%
Belanja Tidak langsung	1.745.966.702.000,00	68%
Belanja Langsung	808.380.069.000,00	32%
<b>Total belanja</b>	<b>2.554.346.771.000,00</b>	<b>100%</b>

Sumber: APBD Kab. Pati, 2016

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang utama pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan program-program pendukung, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 599.790.045.695,00 atau sebesar 74% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 208.590.023.305,00 atau 35% dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan besaran anggaran 39,85% dari total belanja Utama. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya sebesar 21,85% dari total anggaran belanja Utama. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran Meningkatkan budaya baca masyarakat hanya sebesar 0,05% dan anggaran untuk Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja hanya sebesar 0,07% dari total anggaran belanja langsung utama yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja. Tabel bawah;

**Tabel 2.7**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2016**

No	SASARAN	ANGGARAN	%
1	Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	4.950.729.000	0,86%
2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan	22.404.683.000	3,88%
3	Meningkatnya budaya baca masyarakat	284.677.000	0,05%
4	Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk	6.738.513.500	1,17%
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	229.863.214.000	39,85%
6	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	23.052.165.000	4,00%
7	Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	1.617.614.500	0,28%
8	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	750.462.500	0,13%
9	Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM	2.191.907.850	0,38%
10	Meningkatnya produksi pertanian	38.625.727.500	6,70%
11	Meningkatnya produksi perikanan	27.840.280.000	4,83%
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya	126.032.457.545	21,85%
13	Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi	9.999.955.000	1,73%
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	30.869.220.000	5,35%
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	14.365.583.500	2,49%
16	Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	30.335.768.800	5,26%
17	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja	4.491.893.000	0,78%
18	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS	2.003.211.000	0,35%
19	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	419.949.000	0,07%
	<b>Jumlah Utama</b>	576.838.011.695	100,00%
	<b>Jumlah Pendukung</b>	231.542.057.305,00	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	808.380.069.000,00	

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Pati 2016*

**P**erbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari SAKIP itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Jadi, akuntabilitas bukanlah sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2016. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

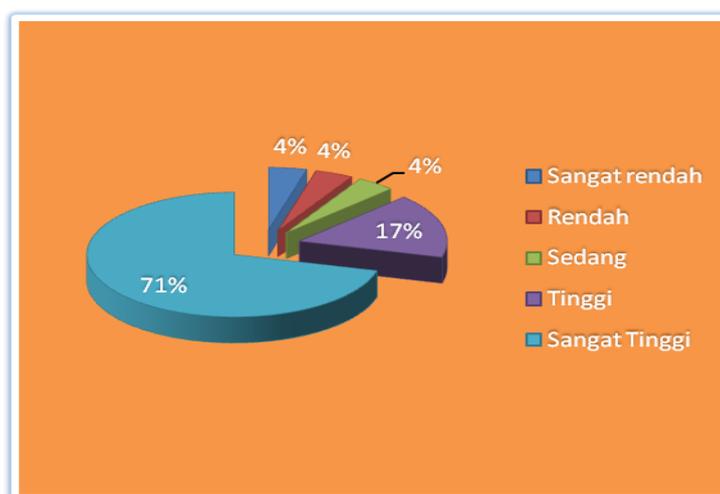
**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
1.	Tercukupinya data tumpang pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	1.	Bangunan sekolah yang berkondisi baik	75	75,68	100,91	Sangat Tinggi
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,35	99,90	100,55	Sangat Tinggi
		3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,90	81,27	103,00	Sangat Tinggi
		4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,95	44,22	113,53	Sangat Tinggi
		5.	Rasio guru terhadap murid	1:9	1:11	97	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	6.	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	99,3	100	101	Sangat Tinggi
		7.	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	98,99	99,92	101	Sangat Tinggi
		8.	Angka Kelulusan (AK) SMA/MA/SMK	98,75	100	101	Sangat Tinggi
		9.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,82	107,6	108	Sangat Tinggi
		10.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,11	86,96	103	Sangat Tinggi
		11.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,73	87,92	115	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	12.	Jumlah perpustakaan	1.526	1.137	75	sedang
		13.	Jumlah pengunjung perpustakaan	29.000	32.030	110	Sangat Tinggi
		14.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.598	49.687	114	Sangat Tinggi
4.	Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk	15.	Kematian ibu (kasus)	17	20	82	Tinggi
		16.	Kematian bayi (kasus)	168	188	88	Tinggi
		17.	Persentase balita gizi buruk	0,01	0,10	-800	Sangat Rendah
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	18.	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah)	100	100	100	Sangat Tinggi
		19.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	20.	Cakupan puskesmas	15	10,95	73	sedang
		21.	Cakupan pembantu puskesmas	5	2,05	41	Sangat Rendah
7.	Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	22.	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	Sangat Tinggi
		23.	Persentase posyandu aktif	100	93,72	93,72	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	24.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	100	99,99	100	Sangat Tinggi
		25.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,31	90,97	177	Sangat Tinggi
		26.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM	27.	Persentase koperasi aktif	100	51	51	Rendah
		28.	Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	25	87	347	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya produksi pertanian	29.	Produksi tanaman pangan Padi sawah	565.362	666.344	118	Sangat Tinggi
		30.	Produksi tanaman pangan Jagung	126.108	168.376	134	Sangat Tinggi
		31.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	60,8	63,8	105	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya produksi Perikanan	32.	Perikanan tangkap	43.762	27.782	63,48	Rendah
		33.	Perikanan budidaya	42.300	42.036	99,38	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya	34.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	62	47	76	Tinggi
		35.	Panjang jalan dilalui roda 4	799,2	677,9	85	Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
13.	Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi	36. Rumah tangga bersanitasi	87	92	106	Sangat Tinggi
		37. Rumah tangga pengguna air bersih	80	76,33	95	Sangat Tinggi
		38. Persentase penduduk berakses air minum	80	76,33	95	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	39. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80	79	99	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	40. Rumah tangga pengguna listrik	95	99,48	105	Sangat Tinggi
		41. Rumah layak huni	94	91	97	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	42. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	16	14	88	Tinggi
		43. Jumlah nilai investasi berskala nasional (Milyar rupiah)	1.056	948	90	Tinggi
17.	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja	44. Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,09	69,03	94	Sangat Tinggi
		45. Tingkat pengangguran terbuka	6,71	5,86	87	Tinggi
18.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS	46. PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,09	0,60	500	Sangat Tinggi
19.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	47. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	81	65,21	81	Tinggi
		48. Persentase UMK terhadap KHL	100	100	100	Sangat Tinggi

Dari 48 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 34 IKU telah memenuhi kriteria **sangat tinggi** (69%), 8 IKU memenuhi kriteria **tinggi**, 2 IKU memenuhi kriteria **sedang**, 2 IKU memenuhi kriteria **rendah**; dan 2 IKU memenuhi kriteria **sangat rendah**.

**Grafik 3.1 Capaian Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2016**



Mayoritas IKU Bupati Pati tahun 2016 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria sangat tinggi (71%) dan tinggi (17%).

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2016 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Pati secara bertahap telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang diukur dengan total 48 (empat puluh delapan) indikator.

Berikut ini hasil evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja dari 19 (sembilan belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2016.

**3.2.1 Tujuan: “Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan secara merata”**

Dalam upaya meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan secara merata, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi mencukupi daya tampung dan meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar/menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

**1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah**

Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas mutu pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat, ada 5 (lima) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Bangunan sekolah yang berkondisi baik	Persen	75	75,68	100,91%
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,35	99,90	100,55%
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	78,90	81,27	103,00%
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	38,95	44,22	113,53%
5.	Rasio guru terhadap murid	Rasio	1:09	1:11	97%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>103,04%</b>

**Uraian Pencapaian Indikator:**

**1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik**

Bagian penting dari tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Bangunan sekolah yang berkondisi baik pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 75% terealisasi sebesar 75,68%. Ini berarti capaian indikatornya sebesar 100,91%.

**Tabel 3.4 Kondisi Sekolah di Kabupaten Pati**

No	Sekolah /Madrasah	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Baik	
			Jumlah	%
1.	SD/MI	5.659	3.477	61,44
2.	SMP/MTs	2.059	1.610	78,19
3.	SMA/SMK/MA	1.499	1.310	87,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2016

Dari 5.659 gedung SD/MI yang ada di wilayah Kabupaten Pati terdapat 3.477 gedung SD/MI dalam kondisi baik atau sebesar 61,44%. Gedung SMP/MTs dari total 2.059 gedung terdapat 1.610 gedung atau

78,19% yang berkondisi baik. Sedangkan gedung SMA/SMK/MA yang berkondisi baik sebanyak 1.310 gedung atau sebesar 87,39% dari total 1.499 gedung. Tingkat capaian pada tahun ini melampaui dari target yang telah ditetapkan Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian pada sasaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun Program yang dimaksud meliputi kegiatan antara lain: Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah baik yang bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pati, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni merupakan rasio jumlah siswa kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

**Tabel 3.5 Angka APM dan APK**

JENJANG	APK	APM
PAUD	30,64	-
SD/MI	112,83	99,63
SMP/MTs	101,00	81,27
SMA/MA/SMK	61,70	43,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2016

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A pada tahun 2016 kinerjanya tercapai 100,55% dari target yang telah ditetapkan 99,35% terealisasi sebesar 99,90%. Artinya ada 103.533 siswa usia 7-12 tahun masuk dijenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Pati dari 103.633 orang jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

Sesuai indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B kinerja tahun 2016 masuk dalam kategori *sangat tinggi* yaitu 103,00% dari target yang ditetapkan sebesar 78,90% terealisasi sebesar 81,27%, jumlah siswa usia 13-15 tahun yang berjumlah 48.187 orang mengikuti pendidikan dijenjang SMP/MTs/Paket B dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Pati yang berjumlah 59.289 orang.

Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2016 kinerjanya tercapai sebesar 113,53% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Dari target yang ditetapkan sebesar 38,95% dapat terealisasi sebesar 44,22%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 33.843 orang terhadap jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 76.532 orang.

## 3. Rasio guru terhadap murid

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan. Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai. Tabel berikut menunjukkan rasio jumlah guru terhadap murid tahun 2016.

**Tabel 3.6 Rasio Jumlah Guru dan Murid**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru
1.	SD/MI	876	116.725	9.754
2.	SMP/MTs	218	59.884	5.672
3.	SMA/SMK/MA	130	47.224	4.441
<b>Total</b>		<b>1.224</b>	<b>223.833</b>	<b>19.867</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2016

Perbandingan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Pati 19.867 orang terhadap jumlah murid SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Pati 223.833 orang.

Target yang ditetapkan seorang guru mengampu 9 murid namun yang dapat direalisasikan sampai tahun 2016 seorang guru masih mengampu 11 orang siswa atau 1:11 atau 97% dari target yang ditetapkan.

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Bangunan sekolah yang berkondisi baik	65	65,90	70	61,62	75	75,68	100,91	80	95
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,15	99,46	99,25	99,90	99,35	99,9	100,55	99,50	100
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,35	78,83	78,60	80,84	78,9	81,27	103,00	79,25	103
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,55	39,91	38,80	42,11	38,95	44,22	113,53	39,50	112
5.	Rasio guru terhadap murid	1:10	1:12	1:09	1:11	1:09	1:11	97,18	1:09	97

Bangunan sekolah yang berkondisi baik pada tahun 2012-2016 target yang ditetapkan selalu meningkat dengan harapan pada akhir RPJMD tercapai 80% bangunan sekolah di Kabupaten Pati dalam kondisi baik. Namun pada kenyataannya data menunjukkan bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 bangunan sekolah dalam kondisi baik turun 4,1% dari kondisi tahun sebelumnya yaitu dari 70% menjadi 65,9%. Di tahun 2015 juga terjadi penurunan dari 65,9% menjadi 61,62% bangunan sekolah dalam kondisi baik, meskipun jika dikategorikan capaian kinerja masih dalam kategori tinggi. Tahun 2016 terjadi peningkatan kondisi baik yaitu dari target 75% teralisasi 75,68 % sehingga kinerja mencapai 100,91%. Diharapkan Kabupaten Pati mampu mempertahankan kondisi ini dan meningkatkan capaian kinerja sehingga target akhir tahun 2017 dapat terealisasi.

Angka Partisipasi Murni baik untuk kelompok SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C selalu menunjukkan kinerja yang tinggi rata-rata sudah mencapai harapan yang hendak dicapai di akhir RPJMD. Untuk tahun 2016, Angka Partisipasi Murni kelompok SD/MI/Paket A sudah melebihi 0,4% dari kondisi yang seharusnya dicapai pada akhir RPJMD. Sedangkan kelompok SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C masing-masing lebih 2,02% dan 4,72% dari target akhir RPJMD. Diharapkan Kabupaten Pati mampu mempertahankan kondisi ini sampai dengan akhir tahun 2017.

Selama 2013-2015 rasio guru terhadap murid cenderung menurun, tahun 2013 tercapai kinerja 80% demikian juga di tahun 2014 tercapai 80%. Di tahun 2015 kinerjanya lebih menurun lagi yaitu 78%. Pada Tahun 2016 kinerja tercapai 78%. Rasio guru terhadap murid di tahun 2017 diharapkan mampu mencapai satu guru mengampu 9 orang siswa, namun jika dilihat dari data tahun-tahun terakhir maka masih terdapat selisih cukup besar.

Permasalahan ini disebabkan oleh distribusi guru yang belum merata. Disamping itu dengan adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS oleh pemerintah sehingga tidak ada guru baru yang mengajar di sekolah pinggiran. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pengangkatan guru PNS baru, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan pinggiran.

Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah dari anggaran belanja langsung yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerjanya, yaitu sebesar Rp. 4.950.729.000,00 dan tambahan pada APBD Perubahan hingga mencapai

Rp. 6.079.915.000,00 serapan anggaran 93,06% dengan menjalankan Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Waktu yang dibutuhkan kurang tercukupi (terbatas). Hal ini dikarenakan keterlambatan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Program DAK bidang pendidikan baru dapat dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran. Oleh karena dalam pelaksanaan pengadaan barang harus melalui proses lelang sehingga waktu yang dibutuhkan kurang tercukupi (terbatas).

## 2. **Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan**

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas mutu pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat, ada 6 (enam) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.8 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	Persen	99,3	100	101
2.	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	Persen	98,99	99,92	101
3.	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA	Persen	98,75	100	101
4.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Persen	99,82	107,6	108
5.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	Persen	84,11	86,96	103
6.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76,73	87,92	115
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>105</b>

### **Uraian Pencapaian Indikator:**

#### **1. Angka Kelulusan (AK)**

Angka Kelulusan merupakan rasio jumlah lulusan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 99,30% terealisasi sebesar 100%. Angka realisasi sebesar 100% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 18.915 orang terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 18.915 orang. Ini berarti persentase capaian indikatornya sebesar 101% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Angka Kelulusan SMP/MTs tahun 2016 dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,99% terealisasi sebesar 99,92%. Realisasi sebesar 99,92% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 20.078 orang terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 20.094 orang. Ini berarti persentase capaian indikatornya sebesar 101% sehingga masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 98,75% terealisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah lulusan pada

jenjang SMA/SMK/MA berjumlah 14.058 orang terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 14.058 orang. Ini berarti persentase capaian indikatornya sebesar 101% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

## 2. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan merupakan rasio jumlah siswa tingkat baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu tahun ajaran sebelumnya. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs tahun 2016 kinerjanya mencapai 108% dari target yang ditetapkan sebesar 99,82 terealisasi sebesar 107,6% yaitu perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs yang berjumlah 20.353 orang terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 18.915 orang. Sedangkan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2016 kinerjanya tercapai 103% dari target yang ditetapkan sebesar 84,11% terealisasi sebesar 86,96%. Artinya perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA yang berjumlah 17.459 orang terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 20.078 orang.

Angka Melanjutkan yang besar ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Pati relatif lebih baik dari daerah atau kabupaten sekitarnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka kelulusan dan capaian nilai yang tinggi dalam setiap Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah. Selain itu keberhasilan kontingen Kabupaten Pati dalam menjuarai berbagai lomba baik yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional juga menjadi salah satu daya tarik banyaknya siswa dari kabupaten tetangga yang bersekolah di Kabupaten Pati, terutama terjadi pada kecamatan atau sekolah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain.

## 3. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2016 persentase capaian indikatornya tercapai 115% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Dari target yang ditetapkan sebesar 76,73% terealisasi sebesar 87,92%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 17.465 orang terhadap jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Pati sebanyak 19.867 orang.

**Tabel 3.9 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Satuan Pendidikan	Jumlah Guru	Berkualifikasi S1 / D4		Guru Bersertifikasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
SD	7070	6178	87,38	5.520	49,79
MI	2684	2096	78,09	779	29,02
SMP	2612	2525	96,67	1.329	50,88
MTs	3060	2562	83,73	1.051	34,35
SMA	1060	1023	96,51	491	46,32
MA	1762	1519	86,32	529	30,02
SMK	1619	1562	96,48	429	26,50
<b>Jumlah</b>	<b>19867</b>	<b>17465</b>	<b>87,91</b>	<b>9.622</b>	<b>40,91</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2016

## Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	99,32	99,99	99,3	100	99,3	100	101%	99,5	101
2.	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	98,83	99,85	98,93	99,67	98,99	99,92	101%	99,04	101
3.	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA	98,59	99,96	98,65	99,93	98,75	100	101%	98,8	101
4.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,79	100,89	99,81	123,9	99,82	107,6	108%	99,85	108
5.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	81,11	84,76	82,61	114,95	84,11	86,96	103%	85	102%
6.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72,73	77,77	74,73	85,95	76,73	87,91	115%	80	110%

### 1. Angka Kelulusan (AK)

Angka Kelulusan baik untuk tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA telah menunjukkan kinerja yang tinggi dengan rata-rata capaian diatas 100% setiap tahunnya dan sudah mencapai harapan yang hendak dicapai di akhir RPJMD. Pada tahun 2016, untuk tingkat pendidikan SD/MI sudah melebihi 0,5% dari kondisi yang seharusnya dicapai pada akhir RPJMD, kelompok SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing lebih 0,88% dan 1,2% dari target akhir RPJMD diharapkan Kabupaten Pati mampu mempertahankan kondisi ini sampai dengan tahun 2017.

### 2. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan baik untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs maupun SMP/MTs ke SMA/SMK/MA telah menunjukkan kinerja yang sangat baik terlihat dari capaian kinerja setiap tahunnya yang sudah melampaui harapan yang ingin dicapai pada akhir RPJMD. Untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs sudah melebihi 7,75% dari target akhir RPJMD. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA telah melebihi 1,96% dari target akhir RPJMD. Sehingga diharapkan Kabupaten Pati mampu mempertahankan kondisi ini sampai akhir tahun 2017.

### 3. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Berbanding lurus dengan angka kelulusan maupun angka melanjutkan, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV juga telah mampu menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari kinerja setiap tahunnya yang telah melampaui target yang ditetapkan bahkan pada tahun 2016 telah melampaui harapan yang ingin dicapai pada akhir RPJMD sebesar 7,91%. Hasil ini diharapkan mampu dipertahankan oleh Kabupaten tidak hanya sampai akhir RPJMD akan tetapi sampai tahun-tahun yang akan datang.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pati didukung salah satunya adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp 11.982.906.000,00 terserap Rp. 11.234.931.900,00 serta dengan adanya bantuan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi pendidikan; dan kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV.

### 3. Meningkatnya budaya baca masyarakat

Meningkatnya budaya baca masyarakat merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangun Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas mutu pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat, ada 3(tiga) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.11 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	1.526	1.137	75%
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	29.000	32.030	110%
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	43.598	49.687	114%
Rata-Rata Capaian					100%

#### **Uraian Pencapaian Indikator:**

Kriteria perpustakaan yang layak untuk sekolah dan desa, apabila perpustakaan tersebut dinilai memenuhi standar yang ditetapkan di buku pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang disusun oleh Perpustakaan RI dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berupa payung hukum dan petunjuk teknis penyelenggaraan perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pati yang sesuai dengan kriteria tersebut pada tahun 2016 ada 1.137 sebesar 75%. Dari yang ditargetkan 1.526 perpustakaan.

*Pemuda Karang Taruna "Sari Kamandowo" Desa Talun, Kecamatan Kayen, Pati menggelar sarasehan literasi dan bakti pustaka, Sabtu (16/4/2016).*



Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016, dari target sebesar 29.000 diperoleh realisasi sebesar 32.030 tercapai 110% dan masuk kategori *sangat tinggi*. Sementara jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 43.598 eksemplar dapat terealisasi sebesar 49.687 eksemplar. Ini berarti bahwa nilai persentase capaian indikatornya sebesar 114% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Koleksi jumlah buku perpustakaan daerah sebanyak 49.312 terdiri dari 6.186 eks buku fiksi dan 43.126 eks buku non fiksi, dengan judul berjumlah 20.526 judul.

#### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014 – 2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Jumlah perpustakaan	1.326	1.137	1.426	1.206	1.526	1.137	75%	1.626	70%
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	27.000	20.593	28.000	30.025	29.000	32.030	110%	30.000	107%
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.598	43.890	41.098	47.687	43.598	49.687	114%	46.098	108%

Jumlah perpustakaan selama 3 (tiga) tahun terakhir tren persentase capaian jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pati menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2014 jumlah perpustakaan di Kabupaten Pati sebanyak 1.137 tahun 2015 menjadi 1.206 perpustakaan namun pada tahun 2016 jumlah perpustakaan di Kabupaten Pati kembali pada kondisi di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya mengembangkan perpustakaan belum berhasil, meskipun secara kuantitas jumlah perpustakaan yang ada semakin meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perbandingan realisasi tahun 2016 sebesar 1.137 unit dengan target akhir RPJMD sebesar 1.624 unit dimana baru 70% saja, maka diperlukan usaha yang sangat keras dari pemerintah daerah untuk dapat memenuhi target akhir RPJMD.

**Tabel 3.13 Jumlah Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Pati 2016**

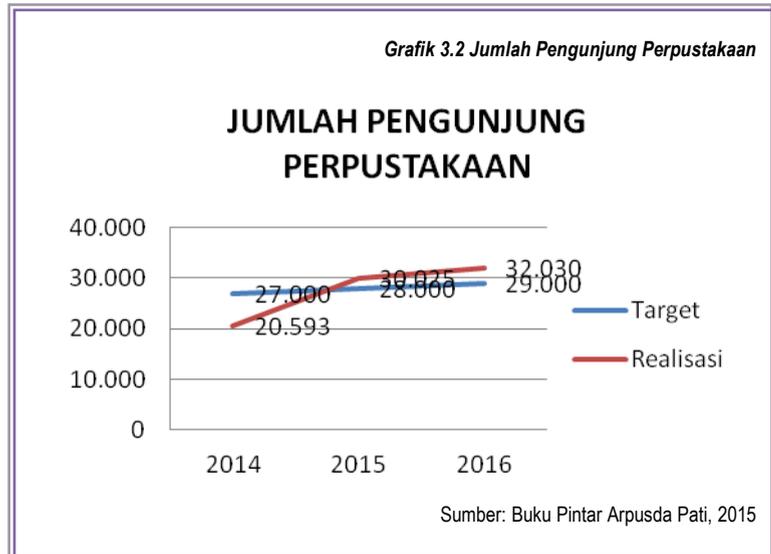
JENIS	2013	2014	2015	2016
SD	385	385	435	385
SMP	198	198	208	198
SMA/SMK	160	160	165	160
UNIVERSITAS	6	6	6	6
PERPUS DESA	339	344	347	344
PERPUS TEMPAT IBADAH	25	25	25	25
TAMAN BACAAN MASYARAKAT	7	7	7	7
PERPUSTAKAAN KHUSUS	10	12	13	12
<b>Jumlah</b>	<b>1.130</b>	<b>1.137</b>	<b>1.206</b>	<b>1.137</b>

Sumber: Buku Pintar Arpusda Pati, 2016

Kinerja Perpustakaan terkait dengan indikator jumlah perpustakaan cukup memprihatinkan di setiap jenis perpustakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Perpustakaan SD menurun jumlahnya dari 435 di tahun 2015 kondisinya kembali di keadaan semula seperti tahun 2013 yaitu 385 demikian juga jenis-jenis perpustakaan lainnya, tidak adanya program monitoring dan evaluasi per post yang sudah dibina disamping rendahnya kualitas SDM pengelola perpustakaan serta pembinaan perpustakaan cenderung dilaksanakan kepada perpustakaan-perpustakaan baru disinyalir yang menyebabkan penurunan ini.

Beberapa SD mengalami kerusakan gedung dan sarana prasarana sehingga memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan untuk digunakan sebagai kegiatan belajar. Demikian juga terjadi pengabungan SD karena kurangnya jumlah murid hal ini secara langsung akan mempengaruhi keberadaan perpustakaan disekolah tersebut selain itu bencana alam banjir ikut mengurangi koleksi buku di sekolah-sekolah yang terdampak, juga penyiangan untuk koleksi yang sudah tidak bisa direkondisi, dari kondisi yang demikian menjadikan perpustakaan-perpustakaan tersebut tidak layak lagi disebut sebagai perpustakaan menurut petunjuk teknis tentang standart nasional perpustakaan dari Perpunas.

Jumlah pengunjung perpustakaan selama 3 (tiga) tahun terakhir capaiannya mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya mengembangkan budaya baca dan perpustakaan telah berhasil dengan baik. Terlebih dengan melihat target akhir RPJMD yang sebesar 30.000 orang pengunjung yang sudah terlampaui sejak tahun 2015 hingga kini di tahun 2016 yang mencapai 32.030 pengunjung.



Grafik 3.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dicapai sebanyak 32.030 pengunjung di perpustakaan daerah tahun 2016, dari itu jumlah peminjam sebanyak 7.663 orang dengan jumlah buku yang dipinjam sebanyak 16.131 eksemplar. Penambahan anggota baru sebesar 1.099 orang.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Pati selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap perpustakaan sebagai sumber informasi telah berhasil dengan sangat baik. Terlebih melihat hasil realisasi tahun 2015 sebesar 47.687 eksemplar dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang hanya sebesar 46.098, dimana terdapat selisih lebih buku sebesar 1.589 eksemplar.

**Tabel 3.14 Jenis Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah**

No.	Jenis	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Fiksi	5.775	5.836	5.945	6.186
2.	Non Fiksi	33.207	38.054	41.742	43.126
<b>Jumlah</b>		<b>38.982</b>	<b>43.890</b>	<b>47.687</b>	<b>20.526</b>

Sumber: Buku Pintar Arpusda Pati, 2016

Dari tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya dukungan yang besar dari pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah buku baik yang berasal dari pengadaan sendiri maupun hibah dari pihak-pihak lain.

**3.2.2 Tujuan: “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas”**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati meliputi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan balita gizi buruk, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Adapun uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

#### 4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk

Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, ada 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.15 Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kematian ibu(kasus)	Kasus	17	20	82%
2.	Kematian bayi (kasus)	Kasus	185	188	88%
3.	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,01	0,10	-800%
<b>Rata-rata Capaian</b>					-210%

#### **Uraian Pencapaian Indikator:**

##### **1. Kematian Ibu**

Kematian ibu 115,32 per 100.000 (20 kasus) kelahiran hidup di kabupaten pati adalah kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yg berhubungan dengan proses kehamilan, persalinan, dan masa kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, tidak termasuk kecelakaan/kejadian insidental. Penyebab kematian Ibu sebagian besar penyebab kematian ibu adalah *eklampsia* (41%) yaitu kelainan pada masa kehamilan, dalam persalinan, atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang (bukan timbul akibat kelainan saraf) dan/atau koma dimana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala *pre-eklampsia* akibat hipertensi yang disebabkan kehamilan (*hipertensi gestasional*), sebuah penyebab signifikan kematian ibu melahirkan. Sedangkan penyebab lain-lain yaitu: jantung, syok *hipovolemik*, keracunan kehamilan, *bronchopneumonia* dan epilepsi.

##### **2. Kematian Bayi**

Kematian bayi tahun 2016 sebesar 10,84 per 1000 kelahiran hidup atau 188 kasus merupakan kematian umur janin > 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal/bayi lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-11 bulan. Penyebab kematian terbesar pada bayi karena faktor lain-lain (85%) yaitu: *hipothermi*, *dermatitis*, *aspirasi*, *hidrofoetalis*, *imatur*, *premature*, perdarahan lambung dan kanker otak. Sedangkan penyebab lainnya (15%) yaitu: *pneumonia* dan diare.

##### **3. Balita Gizi Buruk**

Penyebab langsung gizi buruk bukan hanya asupan makanan yang kurang, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit dan keterlambatan deteksi dini terhadap penanganan kasus gizi buruk. Sedangkan penyebab tidak langsung yang menyebabkan masalah gizi yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak kurang memadai dan pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai.

Dikabupaten Pati terdapat 94 kasus *gejala umum gizi buruk* dari 91.484 *Jumlah sasaran estimasi balita* (0,10%). Tercatat ada 60% kasus gizi buruk yang menimpa anak usia dini di Pati. Kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya ASI eksklusif menjadi salah satu penyumbang tingginya kasus gizi buruk pada anak. ASI eksklusif sangat penting diberikan untuk anak usia 0-6 bulan. Ibu-ibu muda sekarang lebih suka yang praktis-

praktis. Mereka lebih memilih untuk memberikan susu formula dengan harga mahal daripada ASI eksklusif. Padahal kandungan gizi dari ASI eksklusif itu adalah yang terbaik dibandingkan susu olahan pabrikan, Kesalahan selanjutnya adalah pemberian varian makanan ketika anak sedang di usia MPASI, biasanya orang tua kurang memberikan varian asupan sayur dan buah pada anak. Akibatnya, begitu besar si anak jadi pemilih menu makanan Hal tersebut diperburuk juga dengan beredarnya makanan-makanan cepat saji yang banyak mengandung pengawet dan MSG. Kandungan MSG ini sendiri sarat akan zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Anak-anak sekarang lebih suka makanan cepat saji seperti nugget, pizza, dan burger. Makanan itu memang rasanya enak tapi tidak bergizi. Maka jangan heran jika anak lebih memilih untuk makanan cepat saji daripada sayur atau buah. Karena orang tuanya sendiri membiarkan anaknya untuk makan itu dengan alasan, yang penting mau makan Pemahaman dan penekanan untuk meningkatkan kesadaran Ibu akan ASI Eksklusif perlu digalakkan kembali. Baik dari cara memberikan ASI yang benar hingga aturan pemberian makanan yang baik untuk anak.

Dari 94 kasus balita gizi buruk yang terjadi, 100% telah mendapat penanganan dengan program kegiatan Penanggulangan KEP, anemia, GAKY, kurang vitamin A, kurang zat gizi mikro lainnya.

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.16 Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	C		
1.	Kematian ibu (kasus)	18	21	17	20	82%	16	75%
2.	Kematian bayi (kasus)	170	167	185	188	88%	165	86%
3.	Persentase balita gizi buruk	0,02	0,08	0,01	0,10	-800%	0	-800%

#### 1. Kematian ibu

Kasus kematian ibu tahun 2016 lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 20 kasus dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Angka kematian ibu diharapkan dapat ditekan hingga 16 kasus di tahun 2017.

Sebab tidak berhasilnya penurunan AKI dikarenakan semakin tertibnya pencatatan dan pelaporan sehingga kasus yang ada dapat dialporkan dan tidak terlewatkan, sistem rujukan yang belum optimal, Puskesmas PONED belum berfungsi optimal, masih ada keterlambatan penanganan kasus kegawat daruratan maternal di Rumah Sakit (SPOG tidak onsite di RS tapi masih on call, Dokter Anestesi di beberapa RS juga masih banyak yang on call/belum ad Dokter anestesi yang tetap), kurangnya stabilisasi pra Rujukan dari PPK 1, kompetensi SDM yang msih kurang, peran serta masyarakat yang masih kurang dalam kepedulian ibu hamil. Selain itu juga kasus – kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas yang tidak bisa di prediksi (pada awal normal akan tetapi tiba-tiba menjadi komplikasi atau kegawatdaruratan).

Rencana aksi tahun 2017 untuk mencapai target RPJMD antara lain adanya jejaring sistem rujukan sijari emas (sistem jejaring – maternal dan neonatal), deteksi dini resiko tinggi ibu hamil oleh Dokter Spesialis Kandungan, pembentukan forum masyarakat madani peduli penurunan AKI – AKB, peningkatan peran pokja penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, pembinaan bidan baik bidan koordinator maupun bidan desa, peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil (ANC Terpadu), peningkatan kualitas P4K, peningkatan kualitas

AMP (Audit Maternal Perinatal) dan melakukan superfisi fasilitatif terhadap semua puskesmas di wilayah Kabupaten Pati.

## **2. Kematian bayi**

Kasus kematian bayi di Kabupaten Pati pada tahun 2015 kasus kematian bayi dapat ditekan menjadi 170 kasus realisasinya cukup menggembirakan karena dapat ditekan sehingga hanya terjadi 167 kasus.

Sedangkan pada tahun 2016 ini kasus kematian bayi meningkat dari target yang ditetapkan sebanyak 185 kasus, akan tetapi realisasinya sebesar 188 kasus.

Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) belum tercapai karena kondisi sarana dan pra sarana untuk bayi baru lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan yang masih kurang, ketrampilan tenaga kesehatan yang kurang dalam penanganan kasus gawat darurat neonatal (stabilisasi pasien masih kurang), sistem jejaring rujukannya yang belum optimal, fungsi PONEK belum optimal dan RS PONEK di Kabupaten Pati baru 1 (satu) yaitu RSUD Soewondo Pati.

Rencana aksi/program yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai RPJMD tahun 2017 yaitu peningkatan komitmen dengan lintas sektor dan lintas program tentang pelayanan kesehatan bayi, peningkatan sistem jejaring rujukan neonatal, meningkatkan sarana pra sarana yang ada untuk kegawat daruratan neonatal, peningkatan kualitas SDM dalam penanganan kasus kegawat daruratan neonatal dan mengaktifkan DTSP KIBBLA (District Team Problem Solving Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak) yang sudah terbentuk di Kabupaten Pati.

## **3. Persentase balita gizi buruk**

Pada tahun 2016 jumlah balita mengalami gizi buruk mengalami peningkatan, dari target yang ditetapkan sebesar 0,01%, realisasinya sebesar 0,10% cakupan balita gizi buruk tertangani. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tersedianya dana untuk PMT pemulihan, dimulai dari PMT gizi kurang, tidak mampu menurunkan kasus menjadi Gizi Buruk. Penyebab dari Gizi Buruk secara tidak langsung dapat disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, meskipun sering juga didapatkan kasus gizi buruk pada anak-anak yang berasal dari keluarga menengah keatas karena akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap jenis-jenis makanan yang baik dan mengandung gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh anak (tingkat kesadaran masyarakat tentang gizi masih rendah). Tahun 2016 Program yang dilaksanakan adalah Perbaikan gizi masyarakat dengan mengerjakan Kegiatan perawatan balita gizi buruk. Faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari LP&LS sehingga kasus gizi buruk sering kambuh rencana aksi yang akan dikerjakan adalah dengan peningkatan kerjasama LP & LS melalui media yang ada.

Penyebab tingginya kasus gizi buruk dan kenaikan target dari tahun 2015 ke 2016 dikarenakan skill dan knowledge petugas semakin baik dalam mengenali dan menganalisis kasus gizi buruk yang ada, disamping itu kesadaran masyarakat juga semakin baik, mau menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas/POYANDU dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan anak. Selain hal tersebut diatas bila kita bandingkan target SPM Kesehatan 2016 yaitu 100 kasus atau 0.11% dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 0.11% atau 94 kasus dan semua kasus gizi buruk telah tertangani/mendapat perawatan (100%), maka kita masuk dalam katagori berhasil. Pada tahun 2017 nanti atau akhir RPJMD ditargetkan bahwa 0 atau tidak ada kasus gizi buruk di Kabupaten Pati. Hal itu membuat kita harus bekerja lebih keras lagi dan membuat rencana/program yang lebih baik lagi untuk menurunkan kasus gizi buruk.

Rencana aksi tahun 2017 yang akan dikerjakan melalui peningkatan kerjasama LP & LS melalui media yang ada, perawatan balita gizi buruk, pembentukan CFC (Community Feeding Center) di desa dan orientasi petugas dalam PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak).

## 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan sasaran strategis yang masuk prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Rencana Kerja Pembangun Daerah Kabupaten Pati tahun 2016, dari 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya, Kabupaten Pati termasuk berkinerja *sangat tinggi*.

**Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	Persen	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian					100

### Uraian Pengukuran Kinerja:

#### 1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah).

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) Kabupaten/Kota. Sedangkan gawat darurat level 1 itu sendiri merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Pada tahun 2016, cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) di Kabupaten Pati dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari perbandingan pelayanan gawat darurat level 1 terhadap jumlah rumah sakit Kabupaten/Kota, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini berarti seluruh sarana kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta telah semuanya mampu untuk memberikan pelayanan gawat darurat level 1.

#### 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Adapun yang dimaksud dengan sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 86%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga sebesar 854.380 orang terhadap target jumlah

masyarakat miskin yang harus dilayani yang ada di Kabupaten Pati sebesar 999.085 orang. Cara penghitungan indikator ini diadopsi dari SPM Bidang Kesehatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008. Kelemahan dari penghitungan indikator ini terletak pada perbandingan antara jumlah pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada di kabupaten/kota, sehingga tidak mungkin capaiannya akan mencapai 100%. Seharusnya cakupannya didasarkan pada jumlah pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan dan 100% tertangani.

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.18 Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2015 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	110,40	100	100	100	100	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

#### **1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah).**

Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) tahun 2014-2016 target yang ditetapkan selalu 100% sampai akhir RPJMD dengan harapan bahwa seluruh sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pati baik puskesmas dan rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta telah mampu untuk memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa pada tahun 2015 realisasi mencapai 100% yang berarti semua RS di Kabuptaen Pati telah melakukan pelayanan gawat darurat. Tahun 2016 ini semua RS di Kabupaten Pati juga melakukan pelayanan gawat darurat dengan baik yaitu bisa dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasinya juga 100%.

#### **2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Target indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin setiap tahunnya relatif sama yaitu 100% sampai akhir RPJMD dengan harapan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi dengan baik. Selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selalu mencapai target yang diinginkan yakni sebesar 100% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah berhasil sehingga optimis dapat mencapai target akhir RPJMD 2017.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Hal ini berarti terjadi peningkatan pemanfaatan di sarana rujukan dan sistem rujukan telah berjalan optimal dengan adanya

kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dimana dalam kondisi gawat darurat dapat langsung dirujuk ke PPK II (RS) TA 2016.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan sasaran strategis Kabupaten Pati tahun 2016, termasuk berkinerja *sangat tinggi* dicapai dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo".

## 6. *Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin*

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin adalah sasaran yang kurang berhasil di capai oleh Pemerintah Kabupaten Pati, karena dari dua indikator untuk mengukur keberhasilannya hanya tercapai 73% dan 41% atau rata-rata 57%.

**Tabel 3.19 Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan puskesmas	/pend	15	10,95	73
2.	Cakupan puskesmas pembantu	/pend	5	2,05	41
Rata-Rata Capaian					57

### **Uraian Pencapaian Indikator:**

#### **1. Cakupan puskesmas**

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah rasio dari sarana kesehatan dasar yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Data menunjukkan bahwa rasio cakupan puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 1/30.000 pddk dapat terealisasi 1/41.638 pddk, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 73%.

#### **2. Cakupan pembantu puskesmas**

Serupa dengan cakupan puskesmas, cakupan pembantu puskesmas dihitung berdasarkan rasio dari sarana kesehatan dasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jumlah pustu sampai dengan tahun 2016 masih tetap sama sebanyak 50 buah, belum ada penambahan hanya dilakukan perbaikan dan rehab dari sumber dana Kabupaten maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Keadaan ini masih jauh dari target akhir Renstra yang seharusnya terdapat sekitar 40 puskesmas dan 125 pustu untuk melayani penduduk. Begitu juga untuk capaian kinerja 2015, dari target yang ditetapkan sebesar 1/10.000 pddk terealisasi 1/24.200 pddk sehingga diperoleh rasio sebesar 41%.

**Tabel 3.20 Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan Tahun 2016**

KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	PUSKESMAS KELILING	POLINDES
010. Sukolilo	2	3	2	9
020. Kayen	1	3	1	1
030. Tambakromo	1	3	1	17
040. Winong	2	2	2	8
050. Pucakwangi	2	3	2	14
060. Jaken	1	2	1	12
070. Batangan	1	3	1	12
080. Juwana	1	2	1	8
090. Jakenan	1	2	1	15
100. Pati	2	3	2	8
110. Gabus	2	3	2	19
120. Margorejo	1	3	1	13
130. Gembong	1	2	1	12
140. Tlogowungu	1	3	1	12
150. Wedarijaksa	2	1	2	11
160. Trangkil	1	3	1	11
170. Margoyoso	2	1	2	7
180. Gunungwungkal	1	2	1	10
190. Cluwak	1	2	1	12
200. Tayu	2	2	2	5
210. Dukuhseti	1	2	1	9
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>16</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2016

**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Capaian masing-masing indikator kinerja perkembangannya dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.21 Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2015 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Cakupan puskesmas	15	10,95	15	10,95	15	10,95	73%	15	73%
2.	Cakupan puskesmas pembantu	5	2,05	5	2,05	5	2,05	41%	5	41%

Dalam kurun waktu antara 2014-2016 tidak terdapat penambahan yang berarti di sarana kesehatan strata tingkat pertama, sementara terdapat penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan rasio puskesmas dan puskesmas pembantu semakin besar, terlebih jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu tahun 2016 di Kabupaten Pati tidak berubah atau masih sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan standar pelayanan bidang kesehatan rasio ideal puskesmas adalah 1 untuk melayani 30.000 penduduk sedangkan rasio ideal puskesmas pembantu adalah 1 untuk melayani 10.000 penduduk. Hal ini juga yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir masa Rencana Jangka Menengah Daerah.

Salah satu bagian penting pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2016, seperti juga dua tahun sebelumnya, fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan utama penduduk Kabupaten Pati untuk berobat dengan persentase tertinggi adalah petugas kesehatan. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir, bisa dilihat bahwa masyarakat pada umumnya lebih senang memilih berobat ke petugas kesehatan, hal ini dikarenakan praktek petugas kesehatan saat ini merupakan fasilitas yang terdekat dengan penduduk.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin adalah sasaran yang kurang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pati, yang dilaksanakan dalam mendukungnya adalah Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.991.940.000, terserap Rp. 7.566.149.000, seharusnya sisa dana dapat dimaksimalkan untuk mendukung capaian kinerja.

## **7. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat**

Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat merupakan sasaran strategis yang masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 2 (dua) indikator dicapai rata-rata dalam kategori berhasil.

**Tabel 3.22 Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan desa siaga aktif (%)	Persen	100	100	100
2.	Persentase posyandu aktif	Persen	100	93.72	93.72
Rata-Rata Capaian					70.30

### **Uraian Pencapaian Indikator:**

#### **1 Desa Siaga Aktif**

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Adapun Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, dengan ciri:

- a) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya;
- b) Penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa atau Kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen: (1) Pelayanan kesehatan dasar; (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan; dan (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Di Kabupaten Pati dari seluruh total 406 desa terdapat 68 Siaga Aktif Mandiri, 122 desa aktif kategori Purnama, 158 desa kategori Madya dan 64 desa kategori Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan desa siaga aktif mencapai 100%, namun masih perlu peningkatan kategori menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri.

#### **2. Posyandu Aktif**

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar sehingga mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang merupakan tujuan utama dari posyandu. Sedangkan tujuan

husus posyandu yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan mendasar (*primary health care*), meningkatkan peran lintas sektor, dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan mendasar.

**Posyandu Lansia,**  
Pelaksanaan  
posyandu di desa  
Growong Kidul  
dilaksanakan setiap  
sebulan sekali setiap  
tanggal 15 pukul  
09.30



Indikator yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan posyandu ini antara lain frekuensi kunjungan (penimbangan) setiap bulan, namun tidak semua posyandu dapat berfungsi setiap bulan sehingga frekuensinya kurang dari 12 kali setahun. Posyandu dikatakan aktif, apabila frekuensi penimbangan di atas 8 kali setahun.

Posyandu yang terbentuk di Kabupaten Pati sampai tahun 2016 total adalah 1.604 terdiri dari Posyandu Pratama 77, Posyandu Madya 557, Posyandu Purnama 747 dan 223 Posyandu Mandiri. Namun yang aktif hanya 60.47% saja yaitu posyandu yang tergolong purnama dan mandiri dengan total 970 posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa persentase posyandu aktif di Kabupaten Pati sebesar 61% dan masuk dalam kategori *rendah*.

**Grafik 3.3 Strata Posyandu TA 2016**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2016

Desa yang dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang memiliki forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan, memiliki 9 orang atau lebih kader pemberdayaan masyarakat/teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki posyandu dan 4 UKBM yang lain, dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan masyarakat dan dunia, ada peran aktif masyarakat dan peran lebih dari 2 (dua) ormas, memiliki peraturan Kades/Kalor tentang desa siaga aktif dan sudah direalisasikan serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 70% rumah tangga yang ada. Pelaksanaan desa siaga aktif telah membentuk 406 forum kesehatan desa, telah melatih 2.932 dari 6.358 kader kesahatan desa, juga melibatkan 1.267 tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran selama kurun waktu antara tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23 Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2015 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Cakupan desa siaga aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.	Persentase posyandu aktif	100	48	100	61	100	61	61%	100%	61%

Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri sampai dengan tahun ketiga ini baru mencapai 17% atau 68 desa sama dengan tahun lalu 68 desa. Tahun 2016 tidak terjadi peningkatan capaian kinerja Desa Siaga Aktif Mandiri dan Posyandu Mandiri hal ini disebabkan karena untuk mencapai strata desa siaga aktif mandiri harus memenuhi semua indikator strata mandiri yang jumlahnya cukup banyak dan harus melibatkan pengaktifan & UKBM lain di desa yang stratanya juga harus ditingkatkan menjadi mandiri. Hal tersebut tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan semua pihak dan paling penting adalah dari peran serta masyarakat dan sumber dana. Padahal pembentukan dan kelangsungan kelembagaan Desa Siaga Aktif Mandiri merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa sendiri. Hal inilah yang belum dirasakan sebagai kebutuhan dan dukungan pemerintah desa dan masyarakat.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam mengaktifkan desa siaga akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program & sektor melalui kegiatan advokasi dana desa sehingga dalam perencanaan kegiatan pengembangan desa siaga masuk dalam anggaran dana desa, dengan begitu desa dan masyarakat merasa lebih memiliki sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat.

**Tabel 3.24 Perkembangan Posyandu Kabupaten Pati Tahun 2014-2016**

TAHUN	JUMLAH	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		AKTIF
		JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	
2014	1.604	55	3,43	672	41,9	692	43	185	12	877
2015	1.604	77	4,80	557	34,73	747	46,57	223	13,90	970
2016	1.604	77	4,80	557	34,73	747	46,57	223	13,90	970

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2016

Pada tahun 2016 masih terdapat 635 posyandu dalam kategori pratama dan madya, sehingga tidak digolongkan dalam posyandu aktif. Yang digolongkan dalam posyandu aktif adalah yang masuk kategori purnama dan mandiri, sedangkan Posyandu Mandiri sendiri adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatannya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang kepesertaannya lebih dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

*Suasana  
Posyandu Desa  
Purworejo Kec  
Kayen*



Hal ini menunjukkan bahwa POSYANDU aktif di Kabupaten Pati baru sebesar 61% dikarenakan untuk dapat menjadi POSYANDU aktif harus memenuhi 35 indikator telaah kemandirian yang ditetapkan oleh KEMENKES RI. Salah satu indikator yang sangat sulit dicapai adalah POSYANDU harus memiliki bangunan tersendiri, POYANDU tidak boleh di balai desa ataupun di rumah penduduk. Hal itu merupakan kendala yang sangat besar bagi desa dalam menyediakan bangunan karena kuran dalam anggaran dan terbatasnya sarana dan pra sarana.

Rencana aksi tahun 2017 untuk meningkatkan strata POYANDU meningkatkan kerjasama dengan Kepala Desa dalam pemenuhan bangunan POSYANDU melalui anggaran dana desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta dukungan dari semua lini. Keberhasilan pencapaian target kinerja Meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat ini tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan dari semua pihak. Kegiatan-kegiatan yang mendukung agar taget kinerja dapat tercapai antara lain pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga; Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **3.2.3 Tujuan: “Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak”**

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Uraian dari pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

## **8. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak**

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak menjadi prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 dalam prioritas peningkatan **keberdayaan** dan

kesejahteraan masyarakat, dari 3 (tiga) indikator pengukurannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati berkinerja *sangat tinggi* dengan rata-rata capaian 126,33%.

**Tabel 3.25 Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka melek huruf perempuan usia diatas 15 tahun	Persen	100	99,99	100
2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	51,31	90,97	177
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>					126,33

**Uraian Pencapaian Indikator:**

**1. Angka melek huruf perempuan**

Indikator kinerja persentase jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf, pada tahun 2016 dari target 100% telah terealisasi 99,98% (nilai persentase pencapaian 100%). Nilai persentase target dan realisasi diperoleh dari pengukuran perbandingan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun. Pada tahun 2016 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.209 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.221.

**2. Partisipasi angkatan kerja perempuan**

Indikator kinerja persentase jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 dari target 51,31% telah terealisasi 90,97% (nilai persentase pencapaian 177%). Nilai persentase target dan realisasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah partisipasi jumlah angkatan kerja keseluruhan. Pada tahun 2016 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888.

**3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan**

Untuk tahun 2016 terdapat 24 orang korban yang ditangani dari 24 orang yang melapor. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan. Pada tahun 2016 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian 100%).

Keberhasilan kinerja dalam sasaran Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak ini dicapai dengan melaksanakan; Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program peningkatan peran perempuan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 732.017.500, atau 97% dari Anggaran yang disediakan.

**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.26 Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Angka melek huruf perempuan usia diatas 15 tahun	98,37	85,70	99,50	99,98	100	99,99	100	100	100
2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,31	88,56	51,31	90,97	51,31	90,97	177	51,31	177
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### 1. Angka Melek Huruf

Selama 3 (tiga) tahun angka melek huruf anak perempuan usia diatas 15 tahun trennya naik. Pada tahun 2014 dari target 98,37% telah terealisasi 85,70% (nilai persentase pencapaian 87,12%). Pada tahun 2015 dari target 99,50% telah terealisasi 99,98% (nilai persentase pencapaian 100%). Sedangkan pada tahun 2016 dari target 98,37% telah terealisasi 99,99% (nilai persentase pencapaian 102%).

Nilai prosentase target dan realisasi diperoleh dari pengukuran perbandingan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun. Pada tahun 2014 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 79.006 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.193. Pada tahun 2015 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.176 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.191. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.209 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.221.

Pencapaian sebesar 99,98% pada tahun 2016 telah menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati, meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2015 dan masih terdapat selisih sebesar 0,02% dari target akhir RPJMD.

Hambatan utama yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah kemiskinan. Meskipun demikian memperhatikan persentase pencapaian yang cukup signifikan memperlihatkan bahwa hambatan tersebut mampu diatasi. Solusi yang ada dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan peningkatan informasi dan edukasi ke masyarakat yang kurang mampu, melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal.

### 2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2014 dari target 51,31 telah terealisasi 88,56% (nilai persentase pencapaian 172,60%). Pada tahun 2015 dari target 51,31 telah terealisasi 90,97% (nilai persentase pencapaian 177,29%). Pada tahun 2016 dari target 51,31% telah terealisasi 90,97% (nilai persentase pencapaian 177%).

Nilai prosentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan target dan realisasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah partisipasi jumlah angkatan kerja keseluruhan. Pada tahun 2014 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 233.429 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 263.570. Pada tahun 2015 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir tren capaian kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami peningkatan. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati pada tahun 2016, dimana terdapat selisih lebih sebesar 39,66% dari target akhir RPJMD. Meskipun telah

menunjukkan keberhasilan, namun masih ditemui hambatan dalam pencapaian kinerja ini yaitu belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Solusinya adalah peningkatan advokasi yang terus-menerus di kalangan *stakeholder* yang terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Di sisi sasarannya yaitu kaum perempuan juga perlu mendapat pemahaman tentang peningkatan peran perempuan di dunia kerja.

### 3. **Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**

Pada tahun 2014 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian 100%). Pada tahun 2015 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian 100%). Dan pada tahun 2016 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian 100%).

Nilai prosentase target dan realisasi diperoleh dari data pencapaian jumlah korban yang korban yang ditangani dan dari jumlah korban yang melapor. Pada tahun 2014 terdapat data 43 korban yang ditangani dari 43 korban yang melapor. Untuk tahun 2015 terdapat 24 orang korban yang ditangani dari 24 orang yang melapor, demikian juga pada tahun 2016 dari 23 korban yang melapor semua dapat tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan pelayanan atau kinerja yang baik Kabupaten Pati dalam hal perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan.

Hambatan utama yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Solusinya adalah dengan memberikan edukasi dan informasi serta memberi ruang bagi pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan termasuk penyelesaian kasusnya terutama melalui jalur hukum.

**3.2.4 Tujuan: “Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah”**

Menguatnya kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM di Kabupaten Pati diharapkan menjadi daya dorong bagi Kabupaten Pati untuk bersaing dengan daerah-daerah lain.

**9. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM**

Pemerintah Kabupaten Pati sangat berhasil dalam meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM. Ada 2 (dua) Indikator kinerja utama yang digunakan yaitu persentase koperasi aktif di Kabupaten Pati tercapai 51% dan indikator persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UMKM terealisasi 347%.

**Tabel 3.27 Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	100	51	51
2.	Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	Persen	25	87	348
<b>Rata-Rata Capaian</b>					148

**Uraian Pencapaian Indikator:**

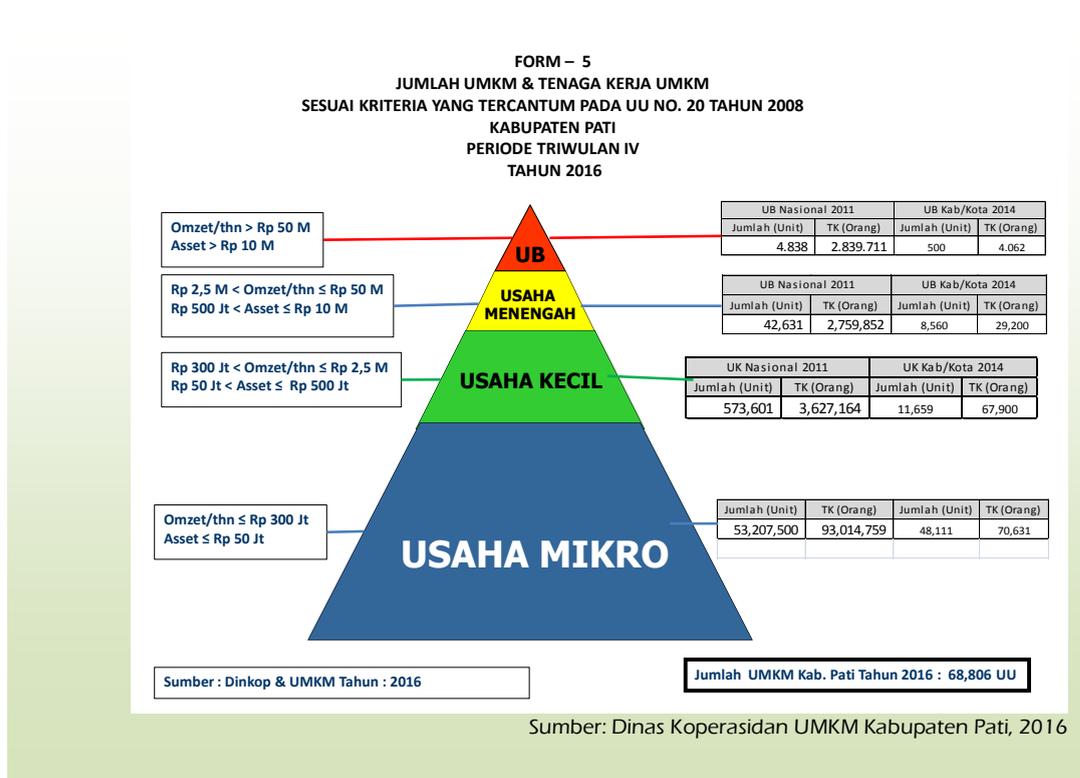
1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang masih aktif melaksanakan RAT dan memiliki kegiatan, baik organisasi maupun usaha. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Pati. Perhitungan indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu jumlah koperasi aktif dibanding jumlah koperasi yang ada. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Pati sebanyak 1.130 unit dan 577 unit diantaranya adalah koperasi aktif atau hanya 51,06%, sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 100%. 553 unit koperasi dinilai tidak aktif karena sudah 3 th berturut-turut tidak melaksanakan RAT selama 2 tahun tidak mempunyai usaha serta sudah tidak mempunyai kewajiban KPD pihak ke 3, sehingga diusulkan pembubarannya, adapun proses pembubaran tersebut tinggal menunggu SK yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Jumlah UKM

Tahun 2016 di Kabupaten Pati tercatat jumlah Usaha Mikro sebanyak 48.111 unit dan Usaha Kecil sebanyak 11.659 unit. Adapun target persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM tahun 2016 adalah sebesar 25%, telah tercapai hingga 86,87%. Ketersediaan bahan baku menjadi faktor utama berkembang pesatnya Usaha Mikro dan Kecil yang didukung adanya ketersediaan tenaga kerja yang murah. Kebijakan pemerintah yang berpihak dalam permodalan berupa kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan legalitas dengan diterbitkannya Izin Usaha Mikro (IUMK) juga menambah kekuatan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk tumbuh dan berkembang.

**Grafik 3.4 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**



**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.28 Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Persentase koperasi aktif	100	41	100	75	100	51	51	100	51
2.	Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	15	41	20	44	25	87	347	50	174

### 1. **Persentase Koperasi Aktif.**

Kinerja Perkoperasian di Kabupaten Pati 3 (tiga) tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase jumlah koperasi di Kabupaten Pati meningkat setiap tahunnya meskipun relatif kecil. Tahun 2013 terdapat 40% koperasi yang terdaftar aktif melakukan kegiatannya sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi hanya 41% koperasi yang masih aktif. Target 100% di tahun 2015 masih juga belum terwujud, kinerja perkoperasian hanya mampu mencapai 75%. Di tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Pati sebanyak 1.130 unit namun sebanyak 553 unit koperasi telah diusulkan pembubarannya karena dinyatakan sudah tidak aktif dan tidak lagi memiliki kewajiban kepada pihak ketiga. Adapun proses pembubaran tersebut tinggal menunggu SK yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Gambaran tentang perkembangan Koperasi di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.29 Data Perkoperasian Kabupaten Pati**

DATA PERKOPERASIAN KABUPATEN PATI	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan koperasi aktif	740	809	821	577
Persentase pertumbuhan koperasi aktif (%)		9,32	1,48	-30
Persentase koperasi aktif (%)	70,21	75,05	74,64	51,06,

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 2016:

Kendala yang dihadapi dalam fasilitasi dan penguatan kelembagaan Koperasi dan LKM dan UMKM adalah minimnya sumber daya manusia di SKPD yang membidangi, dalam hal ini kurangnya penyuluh perkoperasian yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Karena masih rendahnya kepatuhan terhadap perundangan, Peraturan pendukung yang tidak lengkap, Tidak tegasnya sanksi perundangan, Biaya kompetensi SDM pengelola koperasi relatif mahal.

### 2. **Persentase Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Jumlah UKM**

Potensi Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Pati sangat besar dari data potensi dapat dilihat macam-macam usaha yang dapat digarap dalam skala usaha kecil merata di seluruh kecamatan. Setiap tahun realisasi capaian indikator selalu melebihi target, sampai tahun ke-3 target akhir RPJMD 2017 telah terlampaui.

UMKM di Kabupaten Pati sesuai dengan kriteria UU No. 20 Tahun 2008 tahun 2016 tercatat sebanyak 68,806 perusahaan, yang terdiri dari usaha mikro atau omzet per tahun kurang dari 300 jt rupiah dengan aset sampai dengan 50 jt rupiah terdapat 48.111 unit usaha, usaha kecil dengan omzet 300 jt sampai dengan 2.5 M rupiah dengan aset sampai dengan 500 jt rupiah terdapat 11.556 unit usaha, dan usaha menengah/besar masing-masing 8.560 dan 500 unit usaha. Target persentase usaha kecil Kabupaten Pati terlalu kecil dibanding dengan potensi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Pati yang sangat besar, dari data potensi dapat dilihat macam-macam usaha yang dapat digarap dalam skala usaha kecil.

Gambaran tentang perkembangan usaha mikro dan unit usaha kecil di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.30 Data UMKM Kabupaten Pati**

Data UMKM Kabupaten Pati	2012	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan usaha mikro	21.748	22.707	22.717	30.911	48.111
Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)	11	4,41	0,04	36,07	56%
Pertumbuhan usaha kecil	10.035	11.010	11.408	12.158	11.659
Persentase pertumbuhan usaha kecil (%)	29,32	9,72	3,61	6,57	-4%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 2016

Kabupaten pati telah memiliki data potensi kelompok dan sentra sehingga potensi usaha di Kabupaten Pati dapat tergarap dengan maksimal. Pada tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM telah mengembangkan database Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pati, sehingga mampu memberikan gambaran tentang potensi dan pertumbuhan untuk melaksanakan Program-program dinas terkait dalam promosi UMKM, gelar UMKM yang lebih meningkatkan gairah usaha di Kabupaten Pati. Sistem kluster atau sentra usaha akan lebih memudahkan pengembangan usaha sehingga dalam memberikan fasilitas, monitoring dan inventarisasi data UMKM lebih fokus.

**3.2.5 Tujuan: “Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah”**

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

**10. Meningkatnya produksi pertanian**

Sebagai prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 yaitu Prioritas Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Meningkatnya produksi pertanian dapat dikategorikan *sangat berhasil*, dari tiga indikator yang digunakan untuk mengukurnya semua dalam kategori berhasil dengan capaian rata-rata 116%

**Tabel 3.31 Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Produksi tanaman pangan padi sawah	Ton	565.362	666.344	118
2.	Produksi tanaman pangan jagung	Ton	126.108	168.376	134
3.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	60,8	58,25	96
Rata-Rata Capaian					116

**Uraian Pencapaian Indikator**

**1. PADI**

Luas panen target 105.042 Ha dan realisasi 114.402 Ha, sehingga realisasi luas panen lebih besar 9.360 Ha atau plus 8,91%. Produktivitas target 60,8 kw/Ha dan realisasi 58,25 kw/Ha, sehingga realisasi lebih

kecil 2,55 kw/Ha atau minus 4,19%. Dan produksi dengan target 566.362 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan realisasi 666.344 ton Gabah Kering Giling (GKG), sehingga realisasi lebih besar 99.982 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau plus 17,65%.

*Kelompok Tani Handarbeni bersama dengan jajaran Koramil Wedarijaksa dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) melakukan panen raya padi di Desa Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa, Jumat (22/1/2016).*



## 2. JAGUNG

Luas panen target 21.389 Ha dan realisasi 24.287,7 Ha, sehingga realisasi luas panen lebih besar 2.898,7 Ha atau plus 13,55%. Produktivitas target 67,20 kw/Ha dan realisasi 69,32 kw/Ha, sehingga realisasi lebih besar 2,12 kw/Ha atau plus 3,15%. Dan produksi dengan target 126.108 ton pipilan kering dan realisasi 168.376 ton pipilan kering, sehingga realisasi lebih besar 42.268 ton pipilan kering atau plus 33,52%.

**Tabel 3.32 Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Pati**

TAHUN	2014		2015		2016	
	PADI	JAGUNG	PADI	JAGUNG	PADI	JAGUNG
<b>KOMONDITI</b>						
<b>Luas Panen (Ha)</b>	92.559	20.751	109.486	20.319	114.402	24.287
<b>Produktivitas (Kw/Ha)</b>	53,7	60,92	59,01	67,95	58,25	69,32
<b>Produksi (Ton)</b>	497.081	126.410	646.068	138.075	666.344	168.376

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati, 2016*

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.33 Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Produksi tanaman pangan padi sawah	543.409	484.466	554.277	631.884	565.362	666.344	118	576.669	107
2.	Produksi tanaman pangan jagung	121.211	126.410	123.635	138.075	126.108	168.376	134	128.630	112
3.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,68	54,31	59,24	59,58	60,8	58,25	96	62,36	94

### Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan 2016

Produksi Padi Tahun 2016 dibandingkan produksi Tahun 2015 meningkat 31,38% (20.276 ton GKG) dan 8% (49.683 ton GKG) bila dibandingkan dengan target produksi Tahun 2016. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan luas areal panen 4,49% (4.916 ha) bila dibandingkan luas panen Tahun 2015 (109.486 ha) dan 8,91% (9.360 ha) bila dibandingkan dengan target 2016. Hal ini didukung karena pada Tahun 2016 curah hujan sangat tinggi sehingga Musim Tanam padi MT I dan MT II bisa maksimal dan didukung di MT III kondisi kemarau basah sehingga luas areal panen meningkat pada MT III yang biasanya tanam Palawija akan ditanam padi lagi karena air cukup. Hal ini didukung pula adanya kegiatan perbaikan

jaringan irigasi serta perbaikan sarana dan prasarana irigasi lainnya. Apabila dilihat dari besarnya produktivitas padi (ASEM 2016) 58,25 kw/ha pencapaiannya 99,22% bila dibandingkan target produktivitasnya yaitu 58,71 kw/ha.

Produksi jagung Tahun 2016 (ASEM) dibandingkan dari target Tahun 2017 meningkat 14,63% (24.632 ton pipilan kering) dan bila dibandingkan Tahun 2015 meningkat 30.301 ton pipilan kering (21,94 %). Peningkatan ini karena terjadinya peningkatan baik produktivitas maupun luas panen jagung. Produktivitas jagung meningkat 1,65% (1,37 kw/ha); luas panen meningkat 3.930 ha (19,34%). Peningkatan ini disebabkan karena iklim yang sangat mendukung, air cukup dan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung hibrida dengan program GP-PTT jagung dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga didukung dengan kegiatan pemicu peningkatan produktivitas yaitu kegiatan pengembangan jagung hibrida APBN (Kementan) seluas 660 ha; Pengembangan jagung hibrida lahan khusus I : 1.200 ha dan jagung hibrida lahan khusus II : 2.075 ha serta jagung hibrida (APBD Prop. Jateng) seluas 200 ha.

Baik komoditas padi dan jagung mempunyai kecenderungan meningkat pada tahun 2014 diungkit melalui kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi dan Perluasan Areal Tanam-Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung dan Kedelai. Serta sejak tahun 2015 meningkat dikarenakan ada program nasional untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi dan swasembada jagung, kedelai melalui Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai (UPSUS PAJALE). Dalam pelaksanaannya diungkit dengan beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dll.

Peningkatan produksi padi dilaksanakan melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan *System of Rice Intensification (SRI)*. Sedangkan peningkatan produksi jagung dan kedelai dilaksanakan melalui penerapan teknologi Perluasan Areal Tanam-Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP). Substansi dari teknologi tersebut adalah intensifikasi yaitu meningkatkan produksi pada satuan luasan tertentu dengan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan lain-lain.

## 11. Meningkatnya produksi perikanan

Meningkatnya produksi perikanan merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.34 Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perikanan tangkap	Ton	43,762	27.782	63,48%
2.	Perikanan budidaya	Ton	42.300	42.036	99,38%
Rata-Rata Capaian					81,43%

### Uraian Pencapaian Indikator:

Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan tangkap laut dan produksi perikanan tangkap perairan umum. Jumlah produksi perikanan tangkap laut tahun 2016 yang tersebar di 8 TPI berjumlah 27.654.878 kg dengan nilai Rp. 239.573.812.700,00 sedangkan untuk produksi perikanan tangkap perairan umum bersumber dari tangkapan waduk sebesar 19.010 kg dengan nilai Rp.

203.338.000,00 dan tangkapan sungai sebesar 108.249 kg dengan nilai Rp. 987.245.000,00. Ada 3 (tiga) jenis perikanan budidaya di Kabupaten Pati, yaitu budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya mina padi (sawah). Pada budidaya ikan tambak tahun 2016 berhasil memproduksi sebesar 31.755.940 kg dengan nilai Rp. 503.875.470.000,00, budidaya ikan kolam mencapai 10.257.690 kg dengan nilai Rp. 155.222.865.000,00 sedangkan untuk budidaya perikanan mina padi memproduksi sebesar 25.240 kg senilai Rp. 425.660.000,00. Tercatat bahwa produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum mampu memenuhi target.

Selengkapnya data produksi ikan di Kabupaten Pati, volume dan nilai produksinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.35 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014–2016**

NO.	ASAL PRODUKSI	TAHUN			PENINGKATAN (%)
		2014	2015	2016	
1	Perikanan Tangkap Laut				
	- Produksi ( kg )	16.143.036	26.710.118	27.654.878	3,54
	- Nilai (Rp.)	94.149.676.100	229.926.048.700	239.573.812.700	4,20
2	Perikanan Tangkap Perairan Umum				
a.	Waduk				
	- Produksi ( kg )	23.253	19.469	19.010	(2,36)
	- Nilai (Rp.)	202.616.500	208.284.000	203.338.000	(2, 36)
b.	Sungai				
	- Produksi ( kg )	98.745	107.260	108.249	0,92
	- Nilai (Rp.)	900.560.000	978.214.000	987.245.000	0,92
3	Budidaya				
a.	Tambak				
	- Produksi (kg)	28.597.267	30.045.405	31.755.940	5,69
	- Nilai (Rp.)	477.551.738.000	526.233.092.000	503.875.470.000	(4,25)
b.	Kolam				
	- Produksi (kg)	7.909.623	9.145.376	10.257.690	12,16
	- Nilai (Rp.)	110.170.174.000	155.818.060.000	155.222.865.000	(0,38)
	Total				
	- Produksi ( kg )	52.771.924	66.027.628	69.819.007	5,74
	- Nilai (Rp.)	683.020.950.100	913.163.698.700	900.288.390.700	(1,41)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati, 2016

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.36 Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Perikanan tangkap	42.064	16.143	42.904	26.710	43.762	27.782	63%	44.637	62%
2.	Perikanan budidaya	40.739	36.506	42.250	39.217	42.300	42.036	99%	43.350	97%

#### 1. Perikanan tangkap

Tahun 2016 ini terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap, dari 26.710 ton di tahun 2015 menjadi 27.782 ton walaupun hal ini tidak mampu memenuhi target tahun 2016 sebesar 43.762.

Kegagalan capaian kinerja produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) kelangsungan pengelolaan perikanan di laut pada tingkat eksploitasi tinggi (*fully exploited*); (2) faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu permukaan laut (*sea surface temperature-SST*) dan perubahan arah angin; (3) naik turunnya harga bahan bakar yang akan mempengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan; dan (4) keluarnya

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, juga mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan karena sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.

Upaya/strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan tangkap diantaranya dengan: (1) mengganti kapal motor berskala kecil dan motor tempel dengan kapal motor besar yang berukuran > 30 GT dengan memfasilitasi akses perkreditan dari pihak ketiga sehingga operasi penangkapannya lebih luas, tidak terbatas pada perairan pantai saja akan tetapi bisa sampai di perairan lepas. Dengan area penangkapan yang lebih luas diharapkan hasil penangkapan ikan pun dapat meningkat; (2) sosialisasi yang lebih intensif atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 sehingga nelayan bisa memahami maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut; (3) peningkatan SDM bidang perikanan baik meliputi teknik penangkapan maupun upaya konservasi SDI sehingga keberlangsungan *restocking* ikan dapat terjaga; (4) Kemudahan akses perizinan bidang penangkapan ikan sehingga mempermudah legalitas sarana penangkapan ikan. (5) Tidak semua nelayan menjual hasil tangkapannya ke TPI sehingga masih banyak produksi tangkap yang tidak kehitung/terdata, pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan diutamakan kepada nelayan yang melakukan lelang di TPI agar nelayan yang lain tergerak untuk menjual hasil tangkapan di TPI bukan di jual ke pengepul.

## 2. **Perikanan budidaya**

Produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah produksi perikanan tidak dibarengi oleh kenaikan nilai rupiahnya karena untuk nilai produksi sangat tergantung pada daya beli masyarakat. Produksi perikanan meningkat tetapi daya beli masyarakat menurun mengakibatkan nilai produksi juga mengalami penurunan.



Naik turunnya produksi perikanan di Kabupaten Pati, menandakan bahwa ketergantungan pada kondisi alam masih tinggi, sehingga perlu pengembangan teknologi yang bisa memberikan jalan keluar agar ketergantungan kepada kondisi alam dapat teratasi. Adapun usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu dengan memperbaiki daya dukung lahan, peningkatan Sumber Daya Manusia baik itu pelaku usaha perikanan maupun aparaturnya salah satunya dengan memberikan pelatihan maupun pembinaan bagaimana cara membudidayakan ikan yang benar, menerapkan pola diversifikasi usaha (keberagaman jenis ikan yang dibudidayakan), intensifikasi (menambah jumlah ikan yang dibudidayakan) dan introduksi (membudidayakan ikan yang sebelumnya belum di budidaya di daerah tersebut).

Meningkatnya produksi perikanan merupakan sasaran strategis yang didukung dengan anggaran Rp. 15.006.697.000,00 dengan serapan sebesar 96,26%. Atau Rp. 14.445.792.307,00 dengan melaksanakan program-program sebagai berikut; Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; Program pengembangan budidaya perikanan; Program pengembangan perikanan tangkap; Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

**3.2.6 Tujuan: “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah”**

Infrastruktur yang memadai akan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pati sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pati. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya, meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air serta meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasarnya adalah sebagai berikut:

**12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah. Ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.37 Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	62	50	81
2.	Panjang jalan dilalui roda 4	Km	799,2	825,327	103
Rata-Rata Capaian					82

**Uraian Pencapaian Indikator:**

Jalan adalah prasarana transportasi daerah yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan juga merupakan infrastruktur yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Jalan dikatakan dalam kondisi baik jika semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Dikatakan dalam kondisi sedang apabila semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-1%) sehingga kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu lintas. Sedangkan jalan dikatakan dalam kondisi rusak apabila semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10-20%), sehingga kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu lintas,

menyebabkan kendaraan harus berjalan secara perlahan lahan, mengurangi kecepatan, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

Sampai tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati telah membangun 825,327 Km terdiri dari jalan kabupaten dengan kondisi jalan beraspal baik sepanjang 409,905 Km atau 49,67 persen dari panjang jalan keseluruhan, jalan beraspal rusak sedang 145,649 Km atau 17,65 persen, jalan beraspal rusak ringan 122,388 Km atau 14,83 persen, Jalan beraspal rusak berat 147,385 Km atau 17,86 persen Kondisi jalan kabupaten pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38  
Jalan Kabupaten Pati  
Kondisi s/d Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2016

Jalan Kabupaten Pati Tahun 2016		
<b>Total Panjang Jalan</b>	: 825,327 Km	3.006,234 m <sup>2</sup>
<b>Terdiri dari :</b>		
<b>a. Jalan Kabupaten</b>	: 825,327 Km	
<b>Dengan Kondisi Jalan</b>		
<b>1. Jalan Beraspal Baik</b>	: 409,905 Km	49,67%
<b>2. Jalan Beraspal Sedang</b>	: 145,649 Km	17,65%
<b>3. Jalan Beraspal Rusak Ringan</b>	: 122,388 Km	14,83%
<b>4. Jalan Beraspal Rusak Berat</b>	: 147,385 Km	17,86%

\*Data dari Seksi Jalan Bidang Bina Marga DPU Kab. Pati 2016

Jaringan jalan dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun apabila jaringan jalan tersebut masuk dalam kategori jalan mantap, yaitu jalan yang masuk dalam kriteria jalan kondisi beraspal baik maupun beraspal rusak. Di Kabupaten Pati, panjang jalan yang dilalui roda 4 pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 799,2 Km realisasinya mencapai 825,327 Km (total panjang jalan Kabupaten Pati).

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014–2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

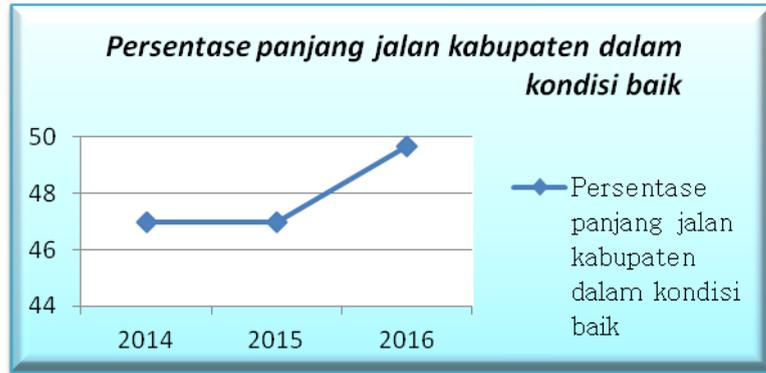
Tabel 3.39 Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	50	47	57	42	62	50	81	65	77%
2.	Panjang jalan dilalui roda 4	769,7	781,2	780,5	818,1	799,2	825,32	103	812,7	103%

#### 1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 45%, tercapai sebesar 44%. Sedangkan pada tahun 2014 dari target yang ditetapkan sebesar 50% hanya tercapai 47%. Mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi target, tapi pada tahun 2015 kondisi jalan dalam kondisi baik lebih buruk dari tahun 2013 yaitu turun menjadi 42%.

Grafik 3.5



Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata capaian sebesar 91,33%, dari kondisi yang diharapkan diakhir RPJMD 2017 masih terpaut 23% meskipun masuk dalam kategori kinerja tinggi, tren yang menurun akan menyulitkan pencapaian target tersebut.

2. Panjang jalan dilalui roda 4

Panjang jalan dilalui roda 4 pada selalu bertambah tiap tahunnya, dari tahun 2013 sampai dengan 2015 telah bertambah 70 kilometer yaitu dari 747,3 hingga sekarang mencapai 818,1. Target RPJMD panjang jalan yang dilalui roda 4 pada 2017 adalah 812,7 sudah terlampaui di tahun 2015 dan semakin meningkat di tahun 2016 ini hingga 825,327 Km.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian indikator panjang jalan dilalui roda 4 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata capaiannya sebesar 101,76% dan termasuk dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya mewujudkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum telah berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya dana yang dianggarkan pada APBD 2015 sebesar 19,75% dari belanja langsung yang terkait pencapaian sasaran atau Rp. 84.068.863.925,00 dan mendapat penambahan di APBDP hingga mencapai Rp. 164.035.248.425,00 dengan serapannya 83% atau Rp. 136.440.077.630,00.

**13. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi**

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan kesadaran pola hidup sehat masyarakat, ada 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerjanya, yaitu rumah tangga bersanitasi capaian kinerjanya 106 persen, rumah tangga pengguna air bersih dicapai 95 dan persentase penduduk berakses air minum dicapai 95 persen. Dilihat dari capaian masing-masing indikator rata-rata tercapai 99 persen menunjukkan bahwa kinerja kabupaten pati dalam meningkatkan ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi berhasil.

Tabel 3.40 Capaian Indikator Sasaran Strategis 13 Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	87	92	106%
2.	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	80	77,15	96%
3.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	80	76,33	95%
Rata-Rata Capaian					99%

**Uraian Pencapaian Indikator:**

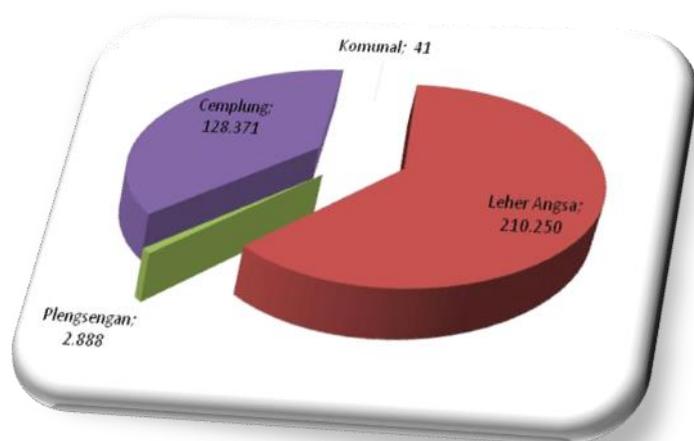
Status capaian kinerja penduduk akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kabupaten Pati Tahun 2016 dengan menggunakan indikator target proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah dan pada periode waktu tertentu adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dengan penduduk seluruhnya dinyatakan dalam prosentase.

Prosentase penduduk akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kabupaten Pati Tahun 2016 adalah 92,7% atau 1.142.887 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.239.988 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 87 %.

Jumlah Sarana Jamban yang dimiliki Tahun 2016 adalah 341.550 sarana dengan rincian jamban komunal 41 sarana (0.01%), jamban leher angsa 210.250 sarana (61,56%), jamban plengsengan 2.888 sarana (0.85%), jamban cemplung 128.371 Sarana (37,58%).

Jumlah penduduk akses terhadap sarana jamban sehat Kabupaten Pati Tahun 2016 adalah 1.142.887 Jiwa dengan rincian akses jamban komunal 1.739 Jiwa (0.14%), akses jamban leher angsa 768.277 Jiwa (58.46%), akses jamban plengsengan 8.463 Jiwa (0.66%), akses jamban cemplung 364.408 Jiwa (30.33%).

**Grafik 3.5 Akses Penduduk Jamban Sehat Tahun 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pati dengan menggunakan indikator target Proporsi Penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk atau rumah tangga seluruhnya pada wilayah dan periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Hal yang sama juga untuk indikator rumah tangga pengguna air bersih.

Persentase penduduk akses air minum Kabupaten Pati Tahun 2016 adalah 77,15% atau 956.700 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.239.988 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 80 %.

Jumlah penduduk akses air minum atau pengguna air bersih di Kabupaten Pati tahun 2016 adalah 956.700 jiwa (77,15% ) dengan rincian akses terhadap sarana air minum adalah Sumur Gali Terlindungi 441.067 Jiwa dengan sarana 133.526, Sumur gali dengan pompa 230.457 Jiwa jumlah sarana 66.346 Sumur bor dengan pompa 146.399 Jiwa sarananya 41.620 mata air terlindungi 6.832 Jiwa (0,53), Penampungan air hujan 6.846 Jiwa (0,53%) dan Perpipaan (PDAM,BPSPAM dll) 125.099 Jiwa'

Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2016 adalah 76.33% yaitu 941.182 dari jumlah penduduk 1.239.988

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.41 Capaian Indikator Sasaran dengan angka absolut**

No	INDIKATOR	TAHUN 2015				TAHUN 2016				Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017	
		TARGET	ABSOLUT PENYEBUT /PEMBILANGAN	HASIL CAPAIAN	%	TARGET	ABSOLUT PENYEBUT/ PEMBILANGAN	HASIL CAPAIAN	%			CAPAIAN
1	Rumah tangga Sanitasi	63	387.771	23.795	61	64,29	387.771	384.335	90	108%	95%	95%
2	Proporsi Penduduk Akses Sanitasi	61	1.286.051	778.678	61	64,29	1.286.051	1.155.260	90			
3	Rumah tangga Air bersih	76	387.771	295.007	76	75	387.335	296.024	76	102%	85%	89%
4	Proporsi penduduk akses air bersih/minum	76	1.286.051	978.397	76	75	1.286.051	981.833	76	102%	85%	89%

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Pati pada akhir tahun 2016 sebesar penduduk 1.239.988 jiwa yang menggunakan akses air minum 76,33 persen mengalami kenaikan 0,31% bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 yaitu sebesar 76,03% dan capaian tahun 2014.

Untuk kondisi sanitasi sampai dengan akhir tahun 2016 Prosentase penduduk akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kabupaten Pati Tahun 2016 adalah 92,7% atau 1.142.887 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.239.988 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 87 %. Tahun 2015 adalah sebanyak 89,83% (1.155.260 jiwa atau 348.335 KK) yang sudah mempunyai akses sanitasi yang layak mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 60,55% (778.678 jiwa atau 234.795 KK).

Program atau kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah yang mendukung pembangunan sanitasi adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran Rp. 929.000.000,00 menerima tambahan dalam APBD-P Rp. 1.380.931.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.256.445.075 atau 91%.

## 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, ada 1 (satu) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.42 Capaian Indikator Sasaran Strategis 14 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	80	79	99

**Uraian Pencapaian Indikator:**

Total luas saluran irigasi di Kabupaten Pati sebesar 1.852,782 Km, yang dalam kondisi baik Tahun 2015 seluas 1.445,168 Km pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.446,968 Km atau 79% saluran dalam kondisi baik meskipun dalam persentase tidak memenuhi target sebesar yang diperjanjikan 80% tercapai hanya 99% dikategorikan berhasil.

Jaringan irigasi merupakan keseluruhan saluran yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah (subak), dengan kondisi baik yang dimaksud adalah jaringan irigasi memiliki kerusakan saluran irigasi < 10 % dari total panjang saluran irigasi. Berikut data realisasi luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 1.446,968 Km. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang ada dibawah ini.

**Tabel 3.43  
Luas Saluran Irigasi Yang Ada di Kabupaten Pati**

Luas Saluran Irigasi yang ada di Kabupaten Pati				
Nama	Luas Baku	Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak
- <i>Induk</i>	59,703 Km	46,568 Km	3,500 Km	7,635 Km
- <i>Sekunder</i>	558,202 Km	440,500 Km	29,600 Km	88, 102 Km
- <i>Pembuang</i>	141,943 Km	112,700 Km	8,400 Km	20,843 Km
- <i>Suplesi</i>	6,654 Km	5,500 Km	0,700 Km	0,454 Km
- <i>Gendong</i>	7,840 Km	6,700 Km	0,500 Km	0,640 Km
- <i>Tersier</i>	1.078,440 Km	850,000 Km	54,000 Km	174,440 Km
<b>Jumlah</b>	<b>1.852,782 Km</b>	<b>1.446,968 Km</b>	<b>96,700 Km</b>	<b>292,114 Km</b>
<b>Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik : 78%</b>				

*\*Data dari Seksi Pembangunan Pengairan Bidang SDA &ESDM DPU Kab. Pati*

Keberadaan irigasi dalam kondisi baik menjamin ketersediaan air untuk pertanian, dampak dari keberhasilan ini terlihat juga pada jumlah kali tanam tercermin pada luas tanam 2016.

**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.44 Capaian Indikator Sasaran Strategis 14 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75	57	77	78	80	79	99	85	92

Total luas saluran irigasi di Kabupaten Pati sebesar 1.852,782 Km, yang dalam kondisi baik tahun 2015 seluas 1.445,168 Km pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.446,968 Km. Dilihat dari target dalam Penetapan Kinerja artinya Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas dan jaringan irigasi dapat dikategorikan berhasil.

Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2013 sebesar 70%. pada tahun 2014 hanya 57%. pada tahun 2015 sebesar yaitu 78%, dan di tahun 2016 ini 79% irigasi di Kabupaten Pati dalam kondisi baik.

Pencapaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik tahun 2014 hanya 57% sedangkan tahun 2013 mencapai 70%. Penurunan ini disebabkan oleh banjir yang terjadi di Kabupaten Pati awal tahun 2014 yang memberikan kontribusi pada kerusakan saluran irigasi di kabupaten Pati.

## 15. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Indikator dari perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dapat dilihat dari penggunaan listrik oleh rumah tangga dan rumah yang layak huni, dari dua indikator ini Kinerja Kabupaten pati dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman sangat tinggi.

**Tabel 3.45 Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rumah tangga pengguna listrik	Persen	95	99,48	105
2.	Rumah layak huni	Persen	94	91	97
<b>Rata-Rata Capaian</b>					95,5

### **Uraian Pencapaian Indikator:**

#### **1. Rumah tangga pengguna listrik.**

Realisasi kinerja dari indikator rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi kabupaten/kota di Kabupaten Pati, yang dapat dilihat dari tabel 3.50 berikut ini.

**Tabel 3.46 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pati 2016**

No	Kab/Kota	Jml KK	Jml KK Berlistrik	Rasio Elektrifikasi Kab /Kota	Jml Dusun	Jml Dusun Belum Berlistrik	Jml Desa
1.	Pati	470.014	309.079	99,48	1.106	73	401

Sumber: \*Data dari Seksi ESDM Bidang SDA & ESDM DPU Kab. Pati

Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 95% terealisasi 99,48% atau tercapai 105%.

#### **2. Rumah layak huni.**

Bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar oleh warganya seperti papan/ tempat tinggal. Sesuai indikator SPM bidang perumahan rakyat tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Pati ada 1.207.399, dengan jumlah rumah 370.878 unit, 91% rumah di Kabupaten Pati layak huni 33.278 unit. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kabupaten Pati berhasil dalam mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan yang berkualitas.

Tabel 3.47  
Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)
1.	Winong	22.559	18.394	2.016
2.	Pucakwangi	16.893	13.231	1.092
3.	Jakenan	17.636	15.508	1.832
4.	Jaken	16.047	13.794	4.317
5.	Juwana	30.830	24.765	1.988
6.	Batangan	16.096	13.673	1.147
7.	Wedarijaksa	22.194	17.902	1.119
8.	Trangkil	21.483	17.744	1.671
9.	Pati	32.161	27.827	802
10.	Sukolilo	31.326	25.323	2.327
11.	Gunungwungkal	11.971	10.793	644
12.	Tambakromo	19.187	15.422	2.145
13.	Tayu	24.720	18.980	1.033
14.	Margorejo	21.135	17.679	456
15.	Tlogowungu	18.940	15.305	1.355
16.	Dukuhseti	20.015	17.990	1.557
17.	Margoyoso	23.194	19.284	1.881
18.	Kayen	29.623	21.878	3.482
19.	Gabus	21.957	18.172	1.299
20.	Cluwak	16.034	13.994	689
21.	Gembong	15.395	13.220	426
	JUMLAH	449.396	370.878	33.278

\*Data dari Seksi Permukiman dan Perumahan Bidang Cipta Karya dan Perumahan DPUP Kab. Pati

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2013-2015 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.48 Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2015 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	89	99,68	90	99,68	95	99,48	105	92	108
2.	Rumah layak huni (%)	90	71	92	74	94	91	97	96	95

Untuk mencapai target sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman program kegiatan yang telah dilakukan adalah program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan dan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan penataan permukiman.

Sejalan dengan meningkatnya roda perekonomian dan perkembangan teknologi, menjadikan kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 291.991 pelanggan naik menjadi 281.335 pelanggan di Tahun 2014 dan 311.236 pelanggan pada tahun 2015.

Jika dilihat dari daya yang terpasang, sebagian besar pelanggan listrik dari tahun ke tahun daya terpasang 450 watt masih mempunyai persentase yang tertinggi. Daya terpasang 450 watt sebanyak 241.962 pelanggan dari total 311.236 pelanggan pada tahun 2015. Sedangkan pelanggan dengan daya terpasang 900 watt sebanyak 49.735, daya terpasang 1300 watt sebanyak 8.950, dan 10.589 pelanggan dengan daya terpasang diatas 1300 watt.

### 3.2.7 Tujuan: “Meningkatnya peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi”

Dalam upaya meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

#### 16. Meningkatkan minat pengusaha dan nilai investasi

Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangun Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan promosi dan kerjasama investasi, ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.49 Capaian Sasaran Strategis 16 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	16	14	88%
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Milyar	1.056	948	90%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					89%

#### Uraian Pencapaian Indikator:

Tahun 2016 minat pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pati cukup besar, harapan masuknya 16 unit investor tercapai 14 unit investor yaitu 88% yang berasal dari investor dalam negeri (14 unit PMDN). Namun nilai realisasi investasi yang masuk belum dapat memenuhi target, hanya mampu memenuhi 90% dari target yang ditetapkan yaitu 1.056 M baru tercapai 948,092 M yang masuk pada tahun 2016.

**Tabel 3.50 Data PMDN dan PMA Kabupaten Pati Tahun 2016**

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Negara	Jenis	Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	CV. GULAKU SEJAHTERA	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Indonesia	PMDN	2.297,5
2	CV. MURIAFOOD JAYA MAKMUR	Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya	Indonesia	PMDN	8.105,5
3	PT. PATI JAYA MOTOR	Reparasi dan Perawatan Mobil	Indonesia	PMDN	9.000
4	PT. ALORATAMA INDAH	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Indonesia	PMDN	3.230,4
5	PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, TBK	Industri Pembekuan Ikan, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya dan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	Indonesia	PMDN	870.000,0
6	Koperasi RUKUN ARTHA SANTOSA - SPDN49.591.03	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Indonesia	PMDN	3.133,4
7	PT. SENGON PATI JAYA	Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya	Indonesia	PMDN	8.910
8	PT. CORNINDO LESTARI INDONESIA	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Indonesia	PMDN	3.316,2
9	PT. TUNGGAL PUTRA SANTOSA	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Indonesia	PMDN	835
10	PT. DIOR ZACHARY JOY	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Indonesia	PMDN	500
11	PT. ARIF WIJAYA SUKSES	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Indonesia	PMDN	12.500
12	PT. RAJA TEPUNG INDONESIA	Industri Pati Dan Produk Pati (Bukan Beras Dan Jagung)	Indonesia	PMDN	7.714,5
13	CV. HARUM MEKAR	Industri Pati Ubi Kayu	Indonesia	PMDN	9.050
14	PT. SUMBER WIDYA MAKMUR	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol	Indonesia	PMDN	9.500
<b>Total</b>					<b>948.092,5</b>

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.51 Capaian Indikator Sasaran Strategis 16 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
		T	R	T	R	T	R	C
1.	Jumlah investor berskala nasional	13	21	14	19	16	14	88
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	1.025	317,03	1.043	4.866	1.056	948	90

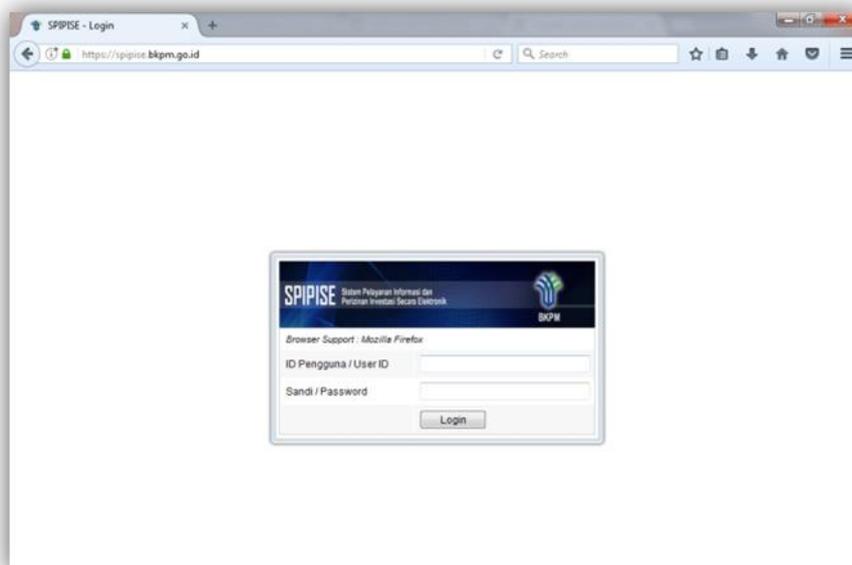
Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2014 sebesar 13 unit dan mampu tercapai sebesar 21 unit. Ini berarti capaian pada tahun 2014 sebesar 162% atau naik sebesar 28,7% dari tahun 2013. Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebesar 14 unit realisasinya mencapai 19 unit. Ini berarti persentase capaiannya sebesar 136%, turun 26% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, dari target yang ditetapkan sebesar 16 unit hanya mampu tercapai 14 unit atau turun 48% dari realisasi tahun 2015.

Selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan realisasi jumlah investor berskala nasional yang masuk di Kabupaten Pati. Salah satu penyebab terjadinya penurunan ini adalah mulai berkurangnya lokasi/kawasan peruntukan industri yang ada dan lokasinya pun tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Selain itu, harga tanah di sekitar kawasan peruntukan industri juga relatif tinggi yang membuat investor yang sudah berinvestasi di Kabupaten Pati enggan untuk melakukan perluasan usahanya.

Dari tabel 3.55 diatas dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian indikator jumlah nilai investasi berskala nasional cenderung mengalami fluktuasi (kenaikan-penurunan). Kenaikan realisasi target dipengaruhi oleh terjadinya gejolak buruh yang menuntut kenaikan upah di wilayah JABODETABEK sehingga banyak perusahaan yang melakukan migrasi ke daerah salah satunya Kabupaten Pati. Penurunan realisasi target dipengaruhi oleh keterbatasan lokasi dan persebaran kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Pati. Meskipun pada tahun 2016 tidak mencapai target tahunan, namun kinerjanya cukup baik yaitu rata-rata 89% yang ditempuh dengan menjalankan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Pengembangan Kemitraan; Program Penataan Struktur Industri; dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati menangani 23 perizinan dan non perizinan. Untuk mempermudah dalam pengolahan dan pengelolaan data perizinan dan non perizinan, KPPT Kabupaten Pati menggunakan aplikasi SIMYANDU. Namun kelemahan dari aplikasi SIMYANDU adalah sistem yang digunakan masih **belum online**, sehingga pemohon izin tidak bisa mengakses informasi perizinan dan non perizinan dari luar. Pada tahun 2017, direncanakan menggunakan aplikasi SIPPADU yang menggunakan sistem *online* dan *tracking system*. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pemohon untuk mengajukan perizinan.

Antarmuka  
Aplikasi  
SPIPISE  
sistem online  
terintegrasi  
dengan  
server BKPM



Pada tahun 2012, KPPT Kabupaten Pati menerima pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data perizinan penanaman modal adalah SPIPISE. Aplikasi SPIPISE menggunakan sistem *online* dan terintegrasi dengan server BKPM. Pada aplikasi ini terdapat 4 jenjang tingkatan pengolah data perizinan penanaman modal, yaitu *Front Office*, *Back Office*, Kepala dan Tata Usaha. Oleh karena itu, melalui aplikasi SPIPISE ini, pemohon dapat melihat sejauh mana perjalanan izin yang sudah diajukan.

**3.2.8 Tujuan: “Meningkatnya kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan”**

Dalam upaya meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja, meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS serta meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

**17. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja**

Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 yaitu prioritas peningkatan kapasitas industri dan perdagangan, realisasi dari 2 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerjanya rata-rata tercapai dalam kategori *tinggi*.

**Tabel 3.52 Capaian Sasaran Strategis 17 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	73,01	69,03	94
2.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,77	5,86	87

**Uraian Pencapaian Indikator**

Angkatan Kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja berumur 15 tahun keatas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15+). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pati tahun 2016, sebesar 69,03%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja sebesar 664.946 orang terhadap jumlah penduduk usia kerja sebesar 963.207 orang, artinya dari total jumlah penduduk yang termasuk usia kerja sebesar 69,03%, masuk sebagai angkatan kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Jadi hanya sekitar sepertiga dari penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. TPT ini memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 5,86%, diperoleh dari perbandingan antara jumlah pengangguran sebesar 38.939 orang terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 664.946 orang, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pati terdapat 5-6 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati baik.

**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Strategis 17 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2015 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,70	68,91	73,01	67,85	73,01	69,03	94	73,40	93
2.	Tingkat pengangguran terbuka	6,9	6,37	6,77	4,43	6,77	5,86	87	6,60	93

**1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

TPAK Kabupaten Pati pada tahun 2014 sebesar 68,91% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 67,85% dan di tahun 2016 naik menjadi 69,03%. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Selama kurun waktu tahun 2014-2016 TPAK di Kabupaten Pati fluktuatif hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya penurunan angka partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja. Keterlibatan tenaga kerja secara aktif dalam perekonomian semakin membesar. Jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) yang semakin meningkat membawa beberapa konsekuensi dalam ketenagakerjaan. Sebagian penduduk usia kerja akan masuk dalam angkatan kerja dan sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja apabila tidak terserap pada pasar kerja maka menjadi pengangguran. Padahal kemampuan pasar kerja dalam menyediakan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Selama kurun waktu tahun 2012 s/d 2015 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati, dimana tahun 2015 turun sebesar 3% dari tahun sebelumnya, serta tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,44%. Melihat realisasi tahun 2015 yang telah melebihi target akhir RPJMD maka dapat dikatakan bahwa program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran telah berhasil dengan baik, dan tinggal mempertahankannya sampai akhir RPJMD 2017.

**Tabel 3.54 TPT dan TPAK Kabupaten Pati 2012 – 2016**

	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TPT</b>	12,74	7,30	6,37	4,43	5,86
<b>TPAK</b>	70,94	71,20	68,91	67,85	69,03

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Pati, 2016

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja dalam kategori tinggi, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2,473,938,500,00 dengan serapan anggaran 97% atau Rp. 2,389,499,600,00 untuk membiayai program-program sebagai berikut:

### 18. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, ada 1 (satu) indikator untuk menilai kinerjanya dan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi.

**Tabel 3.55 Capaian Sasaran Strategis 18 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0,10	0,60	500

#### **Uraian Pencapaian Indikator:**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

PMKS di Kabupaten Pati yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 0,10% realisasinya mencapai 0,60%. Pencapaian realisasi kegiatan tersebut didukung dengan adanya kenaikan anggaran untuk bantuan sosial PMKS untuk bantuan santunan kematian bagi keluarga miskin, bantuan penyandang cacat dan rumah tidak layak huni. Ini berarti persentase capaian tahun 2016 sebesar 500% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

## Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.56 Capaian Indikator Sasaran Strategis 18 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,09	0,16	0,09	0,17	0,10	0,60	500	0,1	500

Kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial selalu melebihi target yang ditentukan. Tahun 2015 capaian realisasinya naik sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 483% dari tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS telah berhasil dengan baik, terlebih lagi melihat selisih antara realisasi tahun 2016 dengan target akhir RPJMD yang telah terlampaui.

Dalam usaha mencapai sasaran meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan kebijakan antara lain; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta bantuan bagi PMKS, Peningkatan kualitas hidup PMKS terhadap pelayanan sosial dasar melalui peningkatan fasilitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas penanganan PMKS dalam melindungi dan mengembalikan fungsi sosial dalam masyarakat, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS, Peningkatan kualitas penanganan PMKS, Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan panti sosial dan anak yatim.

Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.545.000.000,00 terserap sebesar 96% atau senilai Rp. 1.481.000.000,00, program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja *sangat tinggi* ini adalah: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program pembinaan anak terlantar; Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa; Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

### 19. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja

Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai prioritas dalam peningkatan kapasitas industri dan perdagangan, ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya dicapai dengan kategori tinggi.

**Tabel 3.57 Capaian Sasaran Strategis 19 Tahun 2016**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	Persen	81	65,21	81
2.	Persentase UMK terhadap KHL	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian					90

### **Uraian Pencapaian Indikator:**

#### **1. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja**

Peningkatan Jumlah tenaga kerja di kabupaten tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial, dari 26.411 orang jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Pati tahun 2016 masih tetap sebanyak 17.222 atau 65,21%.

#### **2. Persentase UMK terhadap KHL**

Dengan diterbitkannya Pergub Jateng Nomor 560/66/2015 tanggal 20 November 2015, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah 2016 resmi ditetapkan. UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2016 di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. UMK tertinggi masih dipegang Kota Semarang yakni mencapai Rp 1.909.000. Sementara UMK yang terendah dipegang Kabupaten Banjarnegara Rp 1.265.000. Secara persentase rata-rata sebesar 16% kenaikan tertinggi 35% dinikmati Kabupaten Cilacap Wilayah Barat serta kenaikan terendah Kabupaten Magelang dengan 10,7%.

Penentuan besar upah sebagian besar ditentukan dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hanya Kabupaten Demak, Wonosobo, dan Pati yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. Seperti diketahui PP tersebut mengatur bahwa kenaikan upah memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Formula upah minimum yang baru = upah minimum saat ini + (upah minimum x (persentase inflasi + persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang sedang berjalan))

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014 – 2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.58 Capaian Indikator Sasaran Strategis 19 Terhadap Target Akhir RPJMD**

No.	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2016 thd 2017
		T	R	T	R	T	R	C		
1.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	77	77	79	79	81	65,21	92	83	77
2.	Persentase UMK terhadap KHL	100	100	100	100	100	100	99,99	100	84

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Pati tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2.434 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 17.890 orang. Sementara tahun 2015 justru mengalami penurunan sebesar 3.142 orang.

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Pati tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2.434 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 17.890 orang. Sementara tahun 2016 justru mengalami penurunan sebesar 668 yaitu 17.222 orang. Perhitungan jumlah peserta Pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena, BPJS tidak bisa memberikan data yang memilah antara peserta Pekerja dan bukan pekerja.

Ketetapan UMK ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015. Berdasarkan data, besaran UMK yang paling tinggi yakni di Kota Semarang dengan Rp 1.685.000. Adapun besaran UMK terendah di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Banyumas sebesar Rp 1.100.000.

Dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya, UMK 2016 dari besarnya UMK Jawa Tengah 2016 yang sudah dijabarkan diatas, rata-rata peningkatan kenaikan UMK Propinsi Jawa Tengah tahun 2016 sekitar 10%, meskipun ada beberapa kota/kabupaten yang peningkatan UMK nya masih dibawah 10%. Kabupaten Pati sendiri mengalami kenaikan sebesar 10% dibanding 2015.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa upah minimum ini merupakan upah terendah, yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMK berlaku bagi pekerja dengan tingkat paling rendah yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan UMK bisa mengajukan penangguhan kepada Gubernur ataupun pejabat yang ditunjuk sesuai perundang-undangan. Penangguhan UMK dilajukan paling lama 10 hari sebelum berlakunya UMK pada 1 Januari 2016.

Berikut daftar UMK Kabupaten Pati periode tahun 2011-2016:

**Tabel 3.59 Kebutuhan Hidup Lajang dan Upah Minimum Kabupaten Pati Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2016**

TAHUN	KHL	UMK
	779.590,00	
2011	7 93.351,46	733.000,00
2012	850.253,88	769.550,00
2013	927.600,00	837.500,00
2014	1.171.391,00	927.600,00
2015	1.310.000,00	1.176.500,00
2016	(PP) No. 78/2015	1.310.000,00

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016

Dari data tersebut di atas artinya hasil survei KHL dijadikan dasar untuk pengusulan UMK tahun berikutnya, jadi misalnya KHL tahun 2015 dijadikan dasar pengusulan UMK Tahun 2016.

Mulai tahun 2016 pengusulan UMK didasarkan pada PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Formula perhitungan Upah Minimum adalah UMK yang ditetapkan = UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan x Inflasi + PDB tahun berjalan). Keberhasilan capaian kinerja tinggi dalam upaya meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja kinerjanya didukung oleh penggunaan dana senilai Rp. 40.470.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 26.920.000,00 atau terserap 66,52%. Ini digunakan dalam melaksanakan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

### 3.3 REALISASI ANGRAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi Rp. 2.782.221.888.000,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.812.440.462.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 969.781.426.000,00.

**Tabel 3.60**  
**Target Belanja Daerah APBD Perubahan**

Uraian	Target (Rp)	%
Belanja Tidak langsung	1.812.440.462.000	65,14%
Belanja Langsung	969.781.426.000	34,86%
<b>Total belanja</b>	<b>2.782.221.888.000</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Pati, 2016*

Terdapat penambahan anggaran belanja sebesar 8,92% dari APBD sebelum Perubahan. Serapan anggaran belanja pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.590.169.929.934,00 atau 93,10% terdiri dari Rp. 892.280.199.299,00 (92,01%) Belanja Langsung dan Rp. 1.697.889.730.635,00 (93,68%) Belanja Tidak Langsung Alokasi anggaran pada tahun 2016 naik 7,68% dibanding tahun 2015, kenaikan anggaran juga diikuti kenaikan serapan anggaran dari 85,80% ditahun 2015 menjadi 93.10% ditahun 2016. Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp. 723.506.620.645. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 90%, program/kegiatan di sasaran meningkatnya budaya baca masyarakat terealisasi 100% dan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya tercapai (99%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 4 Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk. (38%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan padatable berikut:

**Tabel 3.61**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

No	SASARAN	SASARAN		Serapan	%
		APBD	APBD P		
1	Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	4.950.729.000	6.079.915.000	5.658.151.440	93%
2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan	22.404.683.000	25.595.453.000	24.216.053.090	95%
3	Meningkatnya budaya baca masyarakat	284.677.000	379.814.000	378.931.000	100%
4	Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk	6.738.513.500	3.099.830.500	1.187.699.259	38%
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	229.863.214.000	295.262.747.000	261.127.361.590	88%
6	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	23.052.165.000	27.036.756.000	26.433.607.876	98%
7	Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	1.617.614.500	1.685.614.500	1.528.299.620	91%
8	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	750.462.500	753.162.500	732.017.500	97%
9	Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM	2.191.907.850	2.998.957.850	2.887.200.500	96%
10	Meningkatnya produksi pertanian	38.625.727.500	29.935.702.500	23.480.202.348	78%
11	Meningkatnya produksi perikanan	27.840.280.000	16.327.622.000	15.721.153.928	96%
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya	126.032.457.545	183.428.192.055	182.375.585.989	99%

No	SASARAN	SASARAN		Serapan	%
		APBD	APBD P		
13	Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi	9.999.955.000	7.348.180.000	6.815.383.378	93%
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	30.869.220.000	63.018.856.440	60.099.957.879	95%
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	14.365.583.500	13.193.071.500	11.871.511.550	90%
16	Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	30.335.768.800	39.083.632.800	37.878.945.589	97%
17	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja	4.491.893.000	6.042.063.000	5.498.187.300	91%
18	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS	2.003.211.000	1.817.101.000	1.442.538.575	79%
19	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	419.949.000	419.949.000	372.088.500	89%
	<b>JUMLAH</b>	576.838.011.695	723.506.620.645	669.704.876.911	100%
				<b>Rata-rata realisasi</b>	90%
				<b>Realisasi Tertinggi</b>	100%
				<b>Realisasi Terendah</b>	38%

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2016 merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2012-2017 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten.

Banyak kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, faktor utama adalah perencanaan yang tidak akurat untuk mencapai target yang dicanangkan, reviu atas RPJMD 2012-2017 tidak dilaksanakan dimana target-target yang terdapat didalamnya banyak yang tidak realistis artinya terlalu besar dibanding dengan kemampuan baik dari segi SDM maupun anggaran, ada beberapa program dan dengan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap sehingga berdampak pada capaian kinerja yang ditargetkan, sebaliknya beberapa sasaran meskipun dari sisi anggaran tidak terserap atau serapannya kecil namun target kinerja dicapai dengan sangat berhasil ini menunjukkan bahwa sisi penganggaran yang kurang tepat dimana seharusnya dapat dialokasikan pada sasaran yang memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk sampai dengan *outcome* yang dikehendaki.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Pati kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Reviu atas dokumen perencanaan daerah dengan indikator yang jelas dan terukur sehingga dapat diterjemahkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kinerja individu sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pengawasan dan monitoring secara periodik tentang capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, serta peningkatan kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten sehingga dapat secepatnya dievaluasi kemudian dilakukan rencana aksi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Membangun basis data di setiap SKPD sehingga proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna;
- e. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);
- f. Pembangunan e-Sakip mutlak dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena dengan adanya e-Sakip maka dapat diintegrasikan antara perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kinerja secara periodik dan berkala dengan data yang akurat dan *up to date*.

Akhimya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2016 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, 17 Maret 2017  
BUPATI PATI  
  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

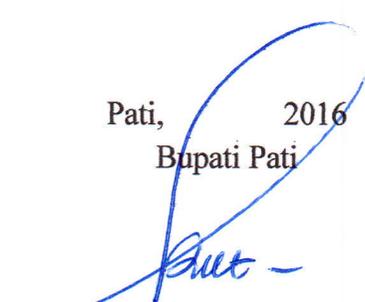
Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : BUPATI PATI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pati, 2016  
Bupati Pati

  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik	75
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,35
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,90
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,95
	5. Rasio guru terhadap murid	1:9
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	6. Angka kelulusan SD/MI	99,3
	7. Angka kelulusan SMP/MTs	98,99
	8. Angka kelulusan SMA/MA/SMK	98,75
	9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	99,82
	10. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,11
	11. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,73
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	12. Jumlah Perpustakaan	1.526
	13. Jumlah Pengunjung perpustakaan	29.000
	14. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.598
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	15. Kematian Ibu (kasus)	17
	16. Kematian Bayi (kasus)	168
	17. Persentase balita gizi buruk	0,01
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	18. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100
	19. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
6. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.	20. Cakupan puskesmas (%)	15
	21. Cakupan pembantu puskesmas (%)	5
7. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	22. Cakupan desa siaga aktif (%)	100
	23. Persentase posyandu aktif	100
8. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	24. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)	100
	25. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,31
	26. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100
9. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	27. Persentase koperasi aktif	100
	28. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	25

10. Meningkatnya produksi pertanian.	29. Produksi tanaman pangan Padi sawah	565.362
	30. Produksi tanaman pangan Jagung	126.108
	31. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	60,8
11. Meningkatnya produksi Perikanan	32. Perikanan tangkap	43.762
	33. Perikanan budidaya	42.300
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya.	34. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	62
	35. Panjang jalan dilalui roda 4	799,2
13. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	36. Rumah tangga bersanitasi (%)	87
	37. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	80
	38. Persentase penduduk berakses air minum	80
14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.	39. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80
15. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	40. Rumah tangga pengguna listrik (%)	95
	41. Rumah layak huni (%)	94
16. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	42. Jumlah investor berskala nasional(PMDN/PMA)	16
	43. Jumlah nilai investasi berskala nasional(M.rupiah)	1.056
17. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.	44. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,09
	45. Tingkat pengangguran terbuka(%)	6,71
18. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.	46. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,09
19. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.	47. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	81
	48. Rasio UMK terhadap KHL	100

<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>	
1.	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rp.	93.017.750.000,00
2.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	76.467.000,00
3.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	15.485.359.000,00
4.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	2.150.000.000,00
5.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rp.	74.210.000,00
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp.	539.958.000,00
7.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Rp.	10.000.000,00
8.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	388.688.000,00
9.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	284.677.000,00

10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	6.624.955.000,00
11.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	5.286.541.000,00
12.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	775.524.500,00
13.	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp.	59.438.000,00
14.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.	892.884.850,00
15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	632.010.000,00
16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.	1.190.721.500,00
17.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	2.914.861.500,00
18.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	451.200.000,00
19.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	266.275.000,00
20.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	758.300.000,00
21.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.	8.530.990.000,00
22.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	811.481.000,00
23.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	4.382.500.000,00
24.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Rp.	296.715.000,00
25.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp.	88.005.000,00
26.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp.	84.265.000,00
27.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp.	178.925.000,00
28.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	71.112.000,00
29.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	88.000.000,00
30.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	491.321.500,00
31.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp.	583.381.000,00
32.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	83.666.357.000,00
33.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	23.480.176.000,00
34.	Program pelayanan kontrasepsi	Rp.	27.270.000,00
35.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rp.	10.073.400.000,00
36.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp.	115.000.000,00
37.	Program pembinaan anak terlantar	Rp.	11.797.000,00
38.	Program Pendidikan Menengah	Rp.	3.872.715.000,00
39.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	150.000.000,00
40.	Program pengembangan Kemitraan	Rp.	187.100.000,00
41.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp.	235.070.000,00
42.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp.	128.340.000,00
43.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp.	156.760.000,00
44.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	106.323.000,00
45.	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Rp.	60.819.500,00
46.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp.	174.195.000,00
47.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp.	27.450.000,00
48.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	419.949.000,00

49.	Program transmigrasi regional	Rp.	18.065.000,00
50.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	244.534.000,00
51.	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp.	756.613.000,00
52.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp.	250.000.000,00
53.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp.	20.835.000,00
54.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp.	612.930.000,00
55.	Program penataan struktur industri	Rp.	93.752.000,00
56.	Program Pendidikan Non Formal	Rp.	689.326.000,00
57.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	28.163.041.000,00
58.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	415.345.000,00
59.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp.	68.155.000,00
60.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	33.965.159.000,00
61.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp.	246.265.500,00
62.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.	30.339.127.545,00
63.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	422.569.000,00
64.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp.	32.860.000,00
65.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp.	11.000.000,00
66.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Rp.	160.000.000,00
67.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp.	250.295.000,00
68.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	1.290.937.000,00
69.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	219.112.000,00
70.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Rp.	25.666.000,00
71.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rp.	868.000.000,00
72.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	169.999.000,00
73.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp.	10.420.000,00
74.	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Rp.	298.000.000,00
75.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp.	737.030.000,00
76.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp.	89.714.000,00
77.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	10.578.006.000,00
78.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	150.000.000,00
79.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	287.413.000,00
80.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp.	128.176.000,00
81.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.	139.000.000,00
82.	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp.	22.229.195.000,00
83.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Rp.	11.000.000,00
84.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	6.477.260.000,00
85.	Program pembangunan sistem informasi/data base infrastruktur	Rp.	100.000.000,00
86.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	510.000.000,00

87.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rp.	8.000.000,00
88.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Rp.	37.840.000,00
89.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp.	272.986.000,00
90.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp.	3.361.090.000,00
91.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp.	98.725.000,00
92.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Rp.	37.781.000,00
93.	Program Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp.	30.000.000,00
94.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	621.688.000,00
95.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp.	10.022.910.000,00
96.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	16.831.260.000,00
97.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp.	944.200.000,00
98.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp.	8.250.000,00
99.	Program peningkatan produksi peternakan	Rp.	60.000.000,00
100.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp.	10.263.940.000,00
101.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	215.000.000,00
102.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp.	12.810.143.000,00
103.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp.	3.375.000.000,00
104.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	3.096.560.000,00
105.	Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	Rp.	318.787.800,00
106.	Program Pendidikan Kedinasan	Rp.	10.000.000,00
107.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp.	61.039.500,00
108.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp.	175.580.000,00
109.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp.	5.845.358.000,00
110.	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Rp.	112.825.870.000,00
111.	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Rp.	7.000.000.000,00

Pati, 2016

BUPATI PATI

  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.